

**PRAKTEK PERJANJIAN UTANG PIUTANG DI SUNGGUMINASA  
KABUPATEN GOWA  
(PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Hukum Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan  
pada Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

EKA GUSTI KARDILLAH  
NIM: 10300113174

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
2017**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EKA GUSTI KARDILLAH  
NIM : 10300113174  
Tempat/Tgl Lahir : Selayar, 24 Mei 1995  
Jurusan : Hukum Pidana & Ketatanegaraan  
Fakultas : Syariah & Hukum UIN Alauddin Makassar  
Alamat : Samata Gowa depan pintu keluar Kampus 2 UIN Alauddin  
Makassar  
Judul : Praktek Perjanjian Utang Piutang Di Sungguminasa Kabupaten  
Gowa (Perspektif Hukum Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya dari penulis. Jika dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh katanya batal demi hukum.

Makassar, 6 Juni 2017

Penulis,

EKA GUSTI KARDILLAH

NIM : 10300113174

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Praktek Perjanjian Utang Piutang Di Sungguminasa Kabupaten Gowa (Perspektif Hukum Islam)”, yang disusun oleh Eka Gusti Kardillah, NIM: 10300113174, Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2017 M, bertepatan dengan 12 Ramadhan 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Serjana Hukum Pidana Islam, Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan dengan beberapa perbaikan.

Makassar, 31 Juli 2017 M

7 Zulkaidah 1438 H

### DEWAN PENGUJI :

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Dra. Nila Satrawati, M.Si	(.....)
Munaqisy I	: Subehan Khalik, S. Ag, M.Ag	(.....)
Munaqisy II	: Hj. Rahmiati, S.pd, M.pd	(.....)
Pembimbing I	: Prof. Dr. H. Usman Jafar, M.Ag	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Hamsir, M. Hum	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum

UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. Darussalam, M. Ag

NIP. 19621016 199003 1 003

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada kita semua. Sholawat dan salam semoga tercurahkan pada Nabi Muhammad saw, yang telah menyampaikan risalah dan syari'at Islam kepada seluruh umat manusia. Atas rahmat Allah swt., penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PRAKTEK PERJANJIAN UTANG PIUTANG DI SUNGGUMINASA KABUPATEN GOWA (Perspektif Hukum Islam)”** dengan baik.

Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum jurusan Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Fakultas Syari'ah Dan Hukum Penyelesaian skripsi ini telah penulis kerjakan secara maksimal namun kritik dan saran penulis harapkan sebagai penambah pengetahuan penulis

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari do'a dan bantuan berbagai pihak yang telah memberi pengetahuan dan inspirasi, sehingga dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Keluarga besarku, Ayahandaku tersayang Bapak Gazali dan Ibundaku terkasih Ibu St. Rahma yang senantiasa memberikan perhatian yang tulus, dukungan serta do'anya untuk kesuksesan putrinya. Kedua Adikku Reni Isnaeni Kardillah dan Sri Wahyuni Kardillah terimakasih untuk semangat dan dukungannya.
2. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Prof. Darussalam, M.Ag dan kedua pembimbing saya selaku dosen pembimbing I Prof. Dr. Usman, MA dan selaku dosen



pembimbing II Dr. Hamsir, SH., M. Hum yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyempurnakan tugas akhir ini.

3. Bapak Muhammad Djoenaidie selaku Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa, Ibu Khusnul Khotimah selaku Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa dan bapak Abdul Latif selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang senantiasa memberikan pengetahuan dan masukan dalam penyusunan tugas akhir.
4. Dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta Staff yang senantiasa mengajar, mendidik, dan membina kami untuk menjadi mahasiswa hukum yang professional.
5. Semua tokoh masyarakat dan para pelaku utang piutang yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan informasi yang mereka ketahui
6. Sahabatku dari Selayar Andi Irmayanti Patta, Nurul Saraswati Ahmad, Sherly Wulandari dan Nurul Fitroh, serta sahabat yang melebihi saudara Anriani, Musdalifah, Hasmi H, Amriani, Zulfahmi, Mawar Adri Ani, Andi Manggazali L yang senantiasa memberikan semangat bagi penulis.
7. Teman-teman yang sering memberi masukan Nur Hikmah Khairani, Siska, Ismail, dan Muhammad Galang Pratama.
8. Semua teman seperjuangan terutama dari kelompok 7,8 dan kelompok D Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan dan semua teman-teman angkatan 2013 Fakultas Syari'ah Dan Hukum yang senantiasa saling mengisi, memotivasi, dan memberikan dukungan ditengah kesibukan menjadi mahasiswa tingkat akhir.

9. Teman-teman KKN angkatan 53 Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang terutama Kordesku Ardiansyah dan posko 8 dusun Bakkila.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi sebagai tugas akhir yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penyelesaian skripsi ini telah penulis kerjakan secara maksimal dan di bimbing oleh dosen yang berkompeten sehingga layak untuk diujikan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum. Namun, penulis tetap mengharapkan masukan dan saran dari pembaca demi pengembangan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, Bangsa, dan Negara serta Agama. Dan semoga Allah swt. selalu memberkati kita semua dalam segala aktifitas kita. Aamiin Yaa Robbaal A'lamiin.

Makassar, 2 Juni 2017

**Penulis**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	ix
ABSTRAK .....	xvi
BAB I PENDAHULUAN .....	1-10
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .....	5
D. Kajian Pustaka .....	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
BAB II TINJAUAN TEORETIS .....	11-30
A. Pengertian Perjanjian .....	11
B. Pengertian Utang Piutang .....	21
C. Dasar Hukum Perjanjian Utang Piutang .....	26
D. Tanggung Jawab Hukum terhadap Perjanjian .....	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....	31-37
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	31
B. Pendekatan Penelitian .....	32
C. Sumber Data .....	33
D. Metode Pengumpulan Data .....	34
E. Instrument Penelitian .....	36
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	37

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	38-60
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	38
B. Praktek Perjanjian Utang Piutang di Sungguminasa Kabupaten Gowa .....	41
C. Perspektif masyarakat terhadap Perjanjian Utang Piutang di Kabupaten Gowa.....	52
D. Perspektif Hukum Islam terhadap Perjanjian Utang Piutang di Kabupaten Gowa.....	54
BAB V PENUTUP .....	61-62
A. Kesimpulan .....	61
B. Implikasi Penelitian .....	62
KEPUSTAKAAN .....	63-65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

## PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel beriku :

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
Y	Ya		Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ( ' ).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>fathah</i>	a	a
إ	<i>kasrah</i>	i	i
أ	<i>dammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	<i>fathah dan yaa'</i>	Ai	a dan i
أُو	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauula*

## 3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :



Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...   ا...ى	Fathah dan alif atau yaa'	a	a dan garis di atas
ى	Kasrah dan yaa'	i	i dan garis di atas
و	Dhammah dan waw	u	u dan garis di atas

Contoh:

مات : *maata*

رَمَى : *ramaa*

قِيلَ : *qiila*

يَمُوتُ : *yamuutu*

#### 4. *Taa' marbuutah*

Transliterasi untuk *taa' marbuutah* ada dua, yaitu *taa' marbuutah* yang hidup atau mendapat *harakat fathah, kasrah, dan dhammah*, transliterasinya adalah [t].sedangkan *taa' marbuutah* yang mati atau mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *taa' marbuutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka *taa' marbuutah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh :

الْأَطْفَالِ رَوْضَةٌ : *raudah al- atfal*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al- madinah al- fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

### 5. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan anda) yang diberi tandasyaddah.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbanaa*

نَجَّيْنَا : *najjainaa*

الْحَقُّ : *al- haqq*

نُعَمَّ : *nu''ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي) maka ia ditransliterasikan sebagai huruf *maddah* menjadi i.

Contoh :

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyyatau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyyatau 'Araby)

### 6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah (az-zalزالah)*

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilaadu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَامُرُونِ *ta’muruuna*

النَّوْعُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أَمْرٌ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Bahasa Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan telah menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur’an (dari *Al-Qur’an*), al-hamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

*Fizilaal Al-Qur’an*

*Al-Sunnah qabl al-tadwin*

### 9. *Lafz al- Jalaalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينَالله *diinullah* بِالله *billaah*

Adapun taamarbuutah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalaalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. contoh :

*hum fi rahmatillaah*

### 10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ajaran Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul refrensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). contoh:

*Wa ma muhammadun illaa rasul*

*Inna awwala baitin wudi' alinnasi lallazii bi bakkata mubarakan*

*Syahru ramadan al-lazii unzila fih al-Qur'a*

Nazir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al- Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu Al-Wafid Mummad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu Al-Walid Muhammad (bukan : rusyd, abu al-walid Muhammad ibnu)  
Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

swt.	= <i>subhanallahu wata'ala</i>
saw.	= <i>sallallahu 'alaihi wasallam</i>
r.a	= <i>radiallahu 'anhu</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
QS.../...4	= QS Al-Baqarah/2:245 atau QS Al-Imran/3:4
HR	= Hadis Riwayat

## ABSTRAK

**Nama : Eka Gusti kardillah**  
**NIM : 10300113174**  
**Judul :Praktek Perjanjian Utang Piutang di Sungguminasa Kabupaten Gowa (Perspektif Hukum Islam)**

---

Studi ini mengkaji tentang Praktek Perjanjian Utang Piutang di Sungguminasa Kabupaten Gowa. Adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana praktek perjanjian utang piutang di Sungguminasa Kabupaten Gowa, bagaimana perspektif masyarakat terhadap perjanjian utang piutang di Kabupaten Gowa, dan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap perjanjian utang piutang di Kabupaten Gowa.

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah pada uraian sebelumnya, maka yang menjadi tujuan penelitian yaitu sebagai berikut: a) Untuk mengetahui bagaimana praktek perjanjian utang piutang di Kabupaten Gowa. b) Untuk mengetahui bagaimana perspektif masyarakat terhadap perjanjian utang piutang di Kabupaten Gowa. c) Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap perjanjian utang piutang di Kabupaten Gowa.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis, syar'i dan sosiolgis. Sumber data di peroleh dari data primer berupa wawancara dengan pegawai Pengadilan Negeri Sungguminasa, tokoh masyarakat dan para pelaku utang piutang dan data sekunder berupa studi kepustakaan dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, yang diolah dan dianalisis deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dari permasalahan. Penelitian ini berlokasi di Sungguminasa Kabupaten Gowa.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 1) Praktek Perjanjian utang piutang di Sungguminasa Kabupaten Gowa dengan jaminan “barang kreditan” kemudharatannya lebih banyak daripada manfaatnya, sering terjadi kesalahpahaman antar sesama teman, tetangga, juga saudara jadi tali silaturahmi kita antar sesama bisa berantakan dan terputus, meskipun antara dua pihak telah sepakat menanggung resiko tetapi hal itu tidak dapat menjamin sepenuhnya. 2) Mereka melakukan utang piutang karena adanya kebutuhan yang mendesak dan tidak ada jalan lain baginya selain berutang. Tetapi harus membuat administrasi utang yang baik dengan menggunakan para saksi, memakai jaminan, dan ditulis secara baik oleh seseorang yang jujur. 3) Pandangan Hukum Islam terhadap perjanjian utang piutang yaitu diatur dalam Firman Allah swt dalam QS al Baqarah/2: 245 dan hadist riwayat Ibnu Majah.

Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Jika ingin membuat suatu perjanjian utang piutang dengan jaminan “barang kreditan” harus memperhatikan terlebih dahulu



kelebihan dan kekurangannya. Apabila kemudaratannya lebih banyak sebaiknya jangan dilakukan karena akan merugikan diri kita sendiri. 2) Bagi orang yang suka berutang, haruslah berhati-hati dan membuat rencana yang baik dan mencicil utangnya. Jangan sampai kita tidak mampu mencicil utang dan menunda pembayaran utang dengan janji-janji saja. 3) Bagi yang memberi utang niatkan untuk ikut membantu dan meringankan beban sesama, serta ikut mengatasi kesulitan orang atau meningkatkan kesejahteraan orang lain dengan meminjamkan barang atau uang. Bukan menyengsarakan orang dengan mengambil keuntungan dari perjanjian tersebut.



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang Masalah***

Di era globalisasi saat ini, hukum perjanjian dalam praktik bisnis hadir menjadi salah satu aspek yang berkembang sangat pesat di seluruh dunia, untuk memenuhi kebutuhan bertransaksi manusia. Namun seiring perkembangan hukum perjanjian dalam praktik bisnis, membuat para pelaku terkadang tidak dapat bertindak hanya dengan berdasar kepada ketentuan-ketentuan dalam buku III KUH perdata tentang perikatan. Perkembangan ini terjadi antara lain karena pasal 1338 KUH Perdata mengatur tentang prinsip atau asas kebebasan untuk membuat janji.

Seperti di ketahui bahwa buku III KUH Perdata menganut paham terbuka atau, karena pihak bebas untuk menemukan isi perjanjian dan pada sistem hukum di mana perjanjian akan tunduk, mengenai hal yang di perjanjikan, cara pelaksanaan perjanjian serta mekanisme, cara pelaksanaan perjanjian serta mekanisme yang akan ditempuh jika terjadi masalah di kemudian hari terkait perjanjian yang telah dibuat. Namun demikian kebebasan yang diberikan tersebut, tentu tidak boleh bertentangan dengan norma serta undang-undang, sehingga meniadakan prinsip-prinsip kejujuran, kepastian, keadilan dan kepastian hukum.

Perjanjian yang erat kaitannya dengan kegiatan bisnis , memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi, yang acap kali berujung di pengadilan, antara lain seperti perjanjian-perjanjian bisnis yang dibuat oleh para pihak atas dasar kebebasan berkontrak, kemudian diingkari isinya dan dimintakan pembatalan perjanjian ke pengadilan. Peningkaran ini sudah tentu dibangun oleh dalil-dalil yang sedemikian

rupa oleh pihak-pihak yang merasa kepentingannya dirugikan. Bahkan, tidak jarang ada salah satu pihak dalam perjanjian yang kemudian meminta kepada hakim pengadilan untuk menyatakan bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum.

Oleh sebab itu, kemungkinan ini merupakan suatu hal yang lazim atau bahkan wajib ada di negara-negara dengan sistem hukum yang modern dan demokratis. Hukum harus berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia. Dengan demikian, agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum ditegakkan di Indonesia. Sengketa-sengketa perdata dimana salah satu pihak menuntut pembatalan suatu perjanjian sudah sering sekali terjadi.

Hukum memiliki tujuan untuk menegakkan kepastian hukum dan keadilan agar memberi kemanfaatan bagi para pencari keadilan yang mengajukan sengketa hukum mereka kepada hakim, maka hakim dituntut untuk mampu menegakkan hukum secara arif dan bijaksana dengan selalu memperhatikan unsur dasar hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radburch : kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Ada dua kutub yang saling tarik menarik dalam pelaksanaan hukum yaitu kutub keadilan dan kepastian hukum.<sup>1</sup>

Sebagai salah satu bentuk transaksi, utang piutang bisa berlaku pada seluruh jenis tingkatan masyarakat manusia. Ia bisa berlaku pada masyarakat tradisional ataupun masyarakat modern, dan oleh sebab itu dapat diperkirakan bahwa jenis transaksi ini sudah ada dan dikenal oleh manusia sejak manusia ada di bumi ini ketika mereka mulai berhubungan satu sama lain.

---

<sup>1</sup>Muhammad Nur Ukasyah, “Sudikno Mertokusumo A’Ad: Mengenal Suatu Hukum Pengantar” (Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016), h. 1-3

Para ulama mensyaratkan supaya pihak-pihak yang mengadakan transaksi utang piutang mestilah orang yang memiliki kecakapan bertindak, yaitu orang yang berakal sehat serta mengerti akan maksud dan tujuan dari perbuatan yang dilakukannya. Orang yang tidak sempurna akalnya, seperti anak kecil atau orang gila, tidaklah diperbolehkan melakukan pinjam meminjam.<sup>2</sup>

Kasus Utang piutang dengan jaminan akan melahirkan hak dan kewajiban diantara pihak-pihak, bahkan seringkali perjanjian utang piutang tersebut dibarengi dengan jaminan berupa harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak.

Prof. Subekti mengartikan perkataan sebagai suatu yang berhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Pihak yang berhak menuntut sesuatu hal diistilahkan sebagai kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan kreditur atau si berpiutang diistilahkan sebagai debitur atau siberutang. Kreditur dan debitur ini merupakan para pihak yang menjadi subjek dalam suatu perikatan, sedangkan yang menjadi objek dalam suatu perikatan merupakan hak dari kreditur dan kewajiban dari debitur yang umumnya disebut sebagai prestasi.<sup>3</sup>

Di dalam Hukum Islam memandang agar perjanjian itu dipenuhi atau bahkan tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian)mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhlah

---

<sup>2</sup>Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Edisi I (Cet. II; Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1997), h. 37-40

<sup>3</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT. Intermasa, 2004), h. 1

janjimu sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. (QS. A-Taubah : 4).<sup>4</sup>

Dalam kenyataannya banyak peristiwa perjanjian baik di atas kertas maupun di bawah tangan banyak yang mengingkarinya. Karena aturan hukum tentang perjanjian utang piutang tidak dipahami oleh sebagian besar warga masyarakat khususnya di Kabupaten Gowa. Terlebih aspek-aspek Hukum Islam banyak yang tidak memahami sehingga mereka mudah dan gampang mengingkarinya yang biasa di sebut dengan ingkar janji.

Dalam praktiknya, masih saja terdapat banyak pihak yang tetap tidak puas dengan sistem hukum tentang jaminan. Bahkan hukum jaminan sering menjadi kambing hitam, terutama jika terbanyak kredit macet. Oleh karena itu, perjanjian utang piutang ini menarik untuk diteliti oleh penulis. Peneliti akan membahas bagaimana praktek perjanjian utang piutang yang ditelaah dari segi Hukum Islam.

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka muncul masalah pokok yang timbul yakni bagaimana perjanjian utang piutang ditelaah dari segi hukum islam. Dari masalah pokok tersebut dapat di rumuskan sub masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek perjanjian utang piutang di Sungguminasa Kabupaten Gowa?

---

<sup>4</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung : J-ART, 2004), h. 187

2. Bagaimana perspektif masyarakat terhadap perjanjian utang piutang di Kabupaten Gowa?
3. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap perjanjian utang piutang di Kabupaten Gowa?

### ***C.Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus***

Untuk mempermudah memahami arti dan makna yang terkandung dalam skripsi ini maka penulis menganggap harus memberi definisi dari judul tersebut yang berjudul “Praktek Perjanjian Utang Piutang di Sungguminasa Kabupaten Gowa (Perspektif Hukum Islam)” agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam memaknainya.

No	Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
1	Perspektif Hukum Islam	Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian perspektif adalah pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya) <sup>5</sup> . Sedangkan Hukum Islam adalah aturan-aturan yang bersumber dari ajaran Islam yang biasa di sepedankan dengan istilah “syariat” dan “fikih” <sup>6</sup> . Namun dalam hal ini, penulis memakai makna dari perspektif adalah sudut pandang hukum islam yang

---

<sup>5</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa* (Ed.4; jakarta : PT. Gramedia Utama, 2012), h. 1470.

<sup>6</sup>Asni, *Pembaharuan Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta : Kementrian Agama Republik Indonesia, 2012), h.38.



		di bangun berdasarkan Nash (Al-qur'an dan Sunnah)
2	Perjanjian	<p>Suatu perbuatan di mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih. (Yan Pramadya Puspa, 1977 : 248)</p> <p>Sedangkan WJS. Poerwadarminta, 1986) dalam bukunya Kamus Umum Bahasa Indonesia memberikan definisi perjanjian yaitu “persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang mana berjanji akan menaati apa yang tersebut dipersetujukan itu.<sup>7</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang mana dalam pasal 1754 perjanjian pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.</p>

---

<sup>7</sup>Chairuman Pasaribu dan Sahrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Cet. III; Jakarta : Sinar Grafika, 2004), h. 1

3	Utang Piutang	utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan yang itu <sup>8</sup>
---	---------------	---

#### ***D. Kajian Pustaka***

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pedoman buku Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A. dengan judul buku Hukum Perjanjian Syari'ah yang diterbitkan oleh PT RajaGrafindo Persada di tahun 2010 dengan pokok pikiran Tinjauan umum tentang pengertian, macam dan asas-asas akad, Terbentuknya akad, dan Akibat hukum dan terminasi akad

Merumuskan isi besar buku ini yakni diharapkan buku ini mencoba menyarikan pokok-pokok hukum perjanjian syari'ah tersebut. Hukum perjanjian syari'ah memuat dua kategori besar ketentuan.

Pertama, ketentuan-ketentuan umum yang berlaku terhadap semua perjanjian baik perjanjian bernama maupun perjanjian tidak bernama.

Kedua, memuat ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku bagi aneka akad khusus yang biasanya dibicarakan ketika berbicara tentang masing-masing akad khusus tersebut. Buku ini berbicara tentang asas-asas umum akad (nazhariyyah al-'aqd), tidak berbicara tentang ketentuan bagi aneka akad khusus, meskipun ketentuan-ketentuan aneka akad khusus itu sering di rujuk, tetapi hanya sebagai contoh.

Dalam buku ini mengalami reorientasi sehingga tidak mengikuti pendekatan tradisional yang menyajikan hukum islam dalam bahasa dan kerangka fikih, seperti

---

<sup>8</sup>Chairuman Passribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* , h. 136-137.

diikuti dalam banyak buku fikih semisal al-fiqh al-islami wa Adillatuh karya Wahbah az-Zuhaili.

Yang kedua buku karangan Prof. Dr. Hendi Suhendi, M.Si. dengan judul Fiqh Muamalah yang diterbitkan oleh PT. RajaGrafindo Persada pada tahun 2013 dengan pokok-pokok pikiran Persoalan-persoalan yang berkenaan dengan hubungan antarmanusia, Hubungan antar kebendaan (muamalah madiyah), Tata kesopanan (muamalah adabiyah)

Merumuskan isi besar buku yakni penulis mencoba mengetengahkan materi dasar fiqh muamalah terlebih dalam amal perbuatan dan kehidupan sehari-hari. Pemahaman terhadap fiqh muamalah sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Hal ini disebabkan fiqh muamalah merupakan aturan yang menjadi pengarah dan penggerak kehidupan manusia. Fiqh muamalah menjadi salah satu unsur perekayasaan aturan mengenai hubungan antar manusia.

Yang ketiga buku karangan Drs. H. Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, S.H. dengan judul Hukum Perjanjian dalam Islam yang diterbitkan oleh Sinar Gafika pada tahun 2004 dengan pokok-pokok pikiran sebagai Macam-macam akad/perjanjian yang ada menurut ketentuan hukum islam, Pembelian barang dengan cicilan dan asuransi, Perjanjian kerja serta perjanjian pengangkutan

Sistematika penulisan buku ini agak berbeda dengan sistematika penulisan buku-buku tentang Hukum Islam Lainnya, selain hanya menyangkut persoalan tertentu (khusus hanya membahas tentang perjanjian dengan berbagai bentuknya) juga diusahakan pembahasannya agak lebih mendalam, dengan ini diharapkan mudah untuk dipahami, khususnya bagi anggota masyarakat yang masih awam tentang seluk beluk perjanjian dalam islam.

Yang keempat, yaitu buku karangan Munir Fuady dengan judul Hukum Jaminan Hutang yang diterbitkan oleh Erlangga pada tahun 2013 dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut latar belakang, pengertian dan sejarah jaminan utang, hak tanggungan jaminan utang, gadai sebagai jaminan utang, dan jaminan utang bersama.

Buku tentang jaminan utang ini berusaha menggambarkan jaminan utang dari segi hukum dengan pendekatan komprehensif dan menyeluruh, yang sekaligus melibatkan berbagai pengkajian undang-undang serta telaah faktual dan teoritis. Posisi hukum jaminan utang yang semakin penting dalam suatu sistem hukum modern menyebabkan hukum bidang ini telah menarik pandangan para ahli hukum dan bisnis, sehingga hukum bidang ini telah mendapat pengaturan yang cukup rapi.

Bahkan jaminan utang dalam bentuk fidusia, yang semula hanya terdapat dalam praktik dan tidak memiliki aturan main sama sekali, sekarang telah ada undang-undang yang khusus mengaturnya.

Dari keempat buku yang penulis baca belum ada yang secara tuntas membahas tentang perjanjian utang piutang ditelaah dari segi Hukum Islam meskipun keempat buku tersebut sudah ada yang menyinggung tentang materi perjanjian utang piutang. Tetapi belum menjawab secara keseluruhan masalah yang akan di teliti oleh penulis. Oleh sebab itu, masih perlu pengetahuan secara mendalam tentang hal tersebut.

### ***E. Tujuan dan Kegunaan penelitian***

#### **1. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah pada uraian sebelumnya, maka yang menjadi tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktek perjanjian utang piutang di Kabupaten Gowa.
- b. Untuk mengetahui bagaimana perspektif masyarakat terhadap perjanjian utang piutang di Kabupaten Gowa.
- c. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap perjanjian utang piutang di Kabupaten Gowa.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk memperkaya kajian-kajian berkaitan dengan perjanjian utang piutang, serta pelaksanaan perjanjian utang piutang yang sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan dalam pandangan Islam.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan maupun sebagai sumber informasi bagi para pengkaji ilmu hukum, dapat bermanfaat sebagai sumber informasi bagi para pihak yang ingin mengetahui dan memahami tentang perjanjian utang piutang agar tidak melanggar dari aturan.

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. *Pengertian Perjanjian*

##### 1. **Pengertian Perjanjian dari segi Hukum Islam**

WJS. Poerwadarminta dalam bukunya Kamus Umum Bahasa Indonesia memberikan definisi perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang mana berjanji akan mentaati apa yang tersebut dipersetujukan itu.<sup>1</sup> Di dalam hukum apabila mempunyai akibat hukum maka perbuatan itu disebut perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban.

Dalam hal perbuatan hukum ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

Perbuatan hukum sepihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak. Satu pihak saja menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak pula misalnya pembuatan surat wasiat dan pemberian hadiah sesuatu benda (hibah).

Perbuatan dua pihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi pihak (timbal balik) misalnya membuat persetujuan jual beli, sewa menyewa dan lain-lain.

Dari uraian di atas jelas terlihat bahwa perbuatan hukum itu juga meliputi perjanjian-perjanjian yang diadakan oleh para pihak. Menyangkut apa yang telah di perjanjikan, masing-masing pihak haruslah saling menghormati terhadap apa yang telah mereka perjanjikan sebab di dalam ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Quran antara lain dalam surah Al-Maidah ayat 1 :

---

<sup>1</sup>WJS. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. ke 9; Jakarta : Balai Pustaka, 1997), h. 401.



يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَةٌ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١٠٨﴾

Terjemahnya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. Almaidah : 1)<sup>2</sup>

Adapun yang dimaksud dengan akad atau perjanjian adalah janji setia kepada Allah swt, dan juga meliputi perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan sesama manusia dalam pergaulan hidupnya sehari-hari.

Dari ketentuan hukum dapat dilihat bahwa apapun alasannya merupakan suatu perbuatan melanggar hukum, dan apabila seseorang itu telah melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar hukum, maka kepada pelakunya dapat dijatuhkan sesuatu sanksi. Penjatuhan sanksi tersebut dengan alasan melanggar perjanjian atau yang dalam istilah dinamakan *wanprestasi*.<sup>3</sup>

## 2. Rukun Perjanjian (Akad)

Dalam hukum islam untuk terbentuknya suatu perjanjian (akad) yang sah dan mengikat haruslah dipenuhi rukun.

Rukun perjanjian (akad)

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Dalam konsepsi

<sup>2</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung : J-ART, 2004), h. 106

<sup>3</sup>Chairuman Passribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* ( Cet. III; Jakarta : Sinar Grafika, 2004), h. 1-2.

Hukum Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun. Menurut ahli-ahli Hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu :

1. Para pihak yang membentuk akad
2. Pernyataan kehendak para pihak
3. Objek akad
4. Tujuan akad

Rukun yang disebutkan diatas harus ada untuk terjadinya akad. Kita tidak mungkin membayangkan terciptanya suatu akad apabila tidak ada pihak yang membuat akad, atau tidak ada pernyataan kehendak untuk berakad, atau tidak ada objek akad, atau tidak ada tujuannya.

Hanya saja perlunya diketahui bahwa sesungguhnya para ahli Hukum Islam sepakat bahwa rukun adalah unsur yang membentuk substansi sesuatu. Akan tetapi, ketika pengertian itu diterapkan secara nyata kepada akad, terjadi perbedaan tentang unsur mana saja yang merupakan bagian yang membentuk akad.

Bagi Mazhab Hanafi yang dimaksud dengan rukun akad adalah unsur-unsur pokok yang membentuk akad. Akad sendiri adalah pertemuan kehendak para pihak dan kehendak itu diungkapkan melalui pernyataan kehendak yang berupa ucapan atau bentuk ungkapan lain dari masing-masing pihak. Oleh karena itu, unsur pokok yang membentuk akad itu hanyalah pernyataan kehendak masing-masing pihak berupa ijab dan kabul.

Adapun para pihak dan objek akad adalah suatu unsur luar, tidak merupakan esensi akad, dan karena itu bukan rukun akad. Namun mazhab ini mengakui bahwa

unsur para pihak dan objek itu harus ada untuk terbentuknya akad. Tetapi unsur-unsur ini berada diluar akad, sehingga tidak dinamakan rukun. Rukun hanyalah substansi internal yang membentuk akad, yaitu ijab dan kabul saja. Ahli hukum Islam Modern, az-Zarqa, menggabungkan kedua pandangan itu dengan mengatakan bahwa keempat unsur yang disebutkan di atas dinamakan unsur akad, yaitu para pihak, objek akad, tujuan akad, rukun akad.<sup>4</sup>

### 3. Syarat-Syarat Perjanjian (Akad)

Setiap pembentuk akad (perjanjian) mempunyai syarat yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan, syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam.

- a. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad.
- b. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini bisa disebut syarat tambahan yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.

Syarat yang umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad.

1. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada dibawah pengampunan (mahjur) karena boros atau yang lainnya.
2. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.

---

<sup>4</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Cet. Ke II; Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2010), h.96-97.

3. Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang.
4. Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara', seperti jual beli *mulasamah*.
5. Akad dapat memberikan faidah sehingga tidaklah sah bila *rahn* dianggap sebagai imbalan amanah.
6. Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. Maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul, maka batallah ijabnya.
7. Ijab dan kabul mesti bersambung sehingga bila seseorang berijab sudah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.<sup>5</sup>

Menurut Sayyid Sabid dalam bukunya Fikih Sunnah secara umum yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian adalah

1. Tidak menyalahi hukum syari'ah yang disepakati adanya

Maksudnya perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syari'ah karena perjanjian yang bertentangan dengan hukum itu tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menempati atau melaksanakan perjanjian tersebut.

---

<sup>5</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Ed.1 (Cet. VIII; Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2013), h. 49-50.

## 2. Harus sama ridha dan ada pilihan

Maksudnya perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridha/rela akan isi perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak.

Dalam hal ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain, dengan sendirinya perjanjian yang diadakan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila tidak didasarkan kepada kehendak bebas pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.

## 3. Harus jelas dan gamblang

Maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman diantara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan dikemudian hari.

Dengan demikian pada saat pelaksanaan penerapan perjanjian masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian atau mengikatkan diri dalam perjanjian haruslah mempunyai interpretasi yang sama tentang apa yang telah mereka perjanjikan., baik terhadap isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh perjanjian itu.<sup>6</sup>

3. Tujuan akad dari segi tujuannya akad dapat dibagi menjadi lima golongan yaitu :

- a. Bertujuan *tamlik*, seperti jual beli.

---

<sup>6</sup>Sayyid sabbid, *Fikih Sunnah*, (Cet ke I; Bandung : PT Alma'arif, 1980), h. 55.

- b. Bertujuan untuk mengadakan usaha bersama (perkongsian) seperti *syirkah* dan *mudharabah*.
- c. Bertujuan taatsiq (memperkokoh kepercayaan) saja, seperti *rahn* dan *kafanah*
- d. Bertujuan menyerahkan kekuasaan, seperti wakalah dan washiyah.
- e. Bertujuan mengadakan pemeliharaan, seperti *ida'* atau titipan.<sup>7</sup>

Itulah penjelasan materi tentang perjanjian kemudian penulis akan membahas materi tentang utang piutang serta jaminan utang. Karena judul skripsi penulis menyangkut perjanjian tentang utang piutang.

#### 4. Jenis-Jenis Perjanjian (Akad)

Beberapa jenis perjanjian (Akad) yaitu :

- a. Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak.

- b. Perjanjian Cuma-Cuma

Menurut ketentuan pasal 1314 KUH Perdata, suatu persetujuan dibuat cuma-cuma adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri.

---

<sup>7</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 55.

#### c. Perjanjian Atas Beban

Perjanjian atas beban adalah dimana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.

#### d. Perjanjian Bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah mempunyai nama sendiri, maksudnya bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian khusus terdapat dalam Bab IV dan Bab V KUHPerdata

#### e. Perjanjian Tak Bernama

Perjanjian tak bernama adalah perjanjian-perjanjian yang tidak diatur didalam KUHPerdata, tetapi terdapat dalam masyarakat. Jumlah perjanjian ini tidak terbatas dengan nama yang disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang mengadakannya.

#### f. Perjanjian Obligator

Perjanjian obligator adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak.

#### g. Perjanjian Kebendaan

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian dengan mana seseorang menyerahkan haknya atas sesuatu benda kepada pihak lain, yang membebaskan kewajiban pihak itu untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain.

#### h. Perjanjian Konsensual

Perjanjian konsensual adalah perjanjian dimana kedua belah pihak telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perjanjian. Menurut KUHPdata perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat (pasal 1338).

#### i. Perjanjian Real

Suatu perjanjian yang terjadinya itu sekaligus dengan realisasi tujuan perjanjian, yaitu pemindahan hak.

#### j. Perjanjian Liberator

Perjanjian dimana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada (Pasal 1438 KUHPdata).

#### k. Perjanjian Pembuktian

Suatu perjanjian dimana para pihak menentukan pembuktian apakah yang berlaku diantara mereka.

#### l. Perjanjian Untung-untungan

Menurut pasal 1774 KUH Perdata, perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung bagi suatu kejadian yang belum tentu.

#### m. Perjanjian Publik

Perjanjian publik adalah suatu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak yang bertindak adalah



pemerintah, dan pihak lainnya swasta. Di antara keduanya terdapat hubungan atasan dengan bawahan

#### n. Perjanjian Campuran

Perjanjian campuran adalah suatu perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian didalamnya.<sup>8</sup>

#### 5. Berakhirnya Perjanjian (Akad)

Suatu perjanjian dapat hapus selain atas persetujuan dari kedua belah pihak, juga dapat hapus karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Dalam prakteknya, perjanjian hapus karena :

1. Ditentukan oleh para pihak dalam perjanjian
2. Adanya pembatalan oleh salah satu pihak terhadap perjanjian
3. Adanya salah satu pihak yang tidak memenuhi kewajiban

Adakalanya pihak yang melakukan perjanjian tidak melaksanakan suatu perbuatan sesuai dengan isi perjanjian yang dibuatnya. Pihak yang melakukan tersebut disebut *wanprestasi*.

Suatu perjanjian akan hapus apabila salah satu pihak melakukan *wanprestasi*. *Wanprestasi* artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam suatu perjanjian, yaitu kesengajaan atau kelalaian, dan karena keadaan yang memaksa.

### **B. Pengertian Utang Piutang**

#### **1. Pengertian Utang Piutang**

---

<sup>8</sup>Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung : PT . Citra Aditya Bakti, 2001), h. 66.

Dalam bukunya Sulaiman Rasyid yang berjudul *Fiqh Islam* yang di maksud utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan yang itu. Pengertian “sesuatu” dari definisi yang diungkapkan diatas tentunya mempunyai makna yang luas, selain dapat berbentuk uang, juga bisa dalam bentuk barang, asalkan barang tersebut habis karena pemakaian.<sup>9</sup>

### **Rukun dan Syarat Utang Piutang**

Adapun Rukun dan Syarat perjanjian utang piutang adalah :

- a. Adanya yang berpiutang  
Yang disyaratkannya harus orang yang cakap untuk melakukan tindakan hukum.
- b. Adanya orang yang berutang  
Yang disyaratkannya harus orang yang cakap untuk melakukan tindakan hukum.
- c. Objek/barang yang diutangkan  
Barang yang diutangkan disyaratkan berbentuk barang yang dapat diukur atau diketahui jumlah maupun nilainya. Disyaratkannya hal ini agar pada waktu pembayarannya tidak menyulitkan, sebab harus sama jumlah atau nilainya dengan jumlah atau nilai barang yang diterima.
- d. Lafas

---

<sup>9</sup>Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Cet.57; Bandung : Sinar Baru Algensido, 2012), h. 309

Adanya pernyataan baik dari pihak yang mengutangkan maupun dari pihak yang berutang.<sup>10</sup>

## 2. Pengertian Jaminan Utang

Jaminan utang adalah pemberian keyakinan kepada pihak *kreditor* atas pembayaran utang-utang yang telah diberikan kepada *debitor*, dimana hal ini terjadi karena hukum ataupun terbit dari suatu perjanjian yang bersifat *assessor* terhadap perjanjian pokoknya berupa perjanjian yang menerbitkan utang piutang.

Ragam jaminan utang diantaranya adalah jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan adalah jaminan yang mempunyai hubungan langsung dengan benda tertentu. Jaminan ini selalu mengikuti bendanya, ke mana pun benda tersebut beralih atau dialihkan, serta dapat dialihkan kepada dan dapat dipertahankan terhadap siapapun.<sup>11</sup>

Jaminan kebendaan yang bersifat khusus mencakup penentuan atau penunjukan atas benda tertentu milik *debitor* atau milik pihak atau milik pihak ketiga untuk menjadi jaminan utangnya kepada *kreditor*, yang jika *debitor wanprestasi* atas pembayaran utangnya, maka hasil dari penjualan benda objek jminan tersebut terlebih dahulu dibayarkan kepada kreditor bersangkutan untuk melunasi pembayaran utang. Seelah itu, jika ada sisa, baru dibagikan kepada *kreditor* lain.

Jaminan kebendaan dilakukan dengan atau tanpa penyerahan kekuasaan dan hak menikmati hasil dari objek jaminan tersebut, yang umumnya memberikan hak

---

<sup>10</sup>Chairuman Passribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* , h. 136-137.

<sup>11</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Riba, Utang piutang, dan Gadai* (Bandung : Alma'arif,1983), h. 50.

untuk dibayarkan utang terlebih dahulu kepada *kreditor*, dengan beberapa pengecualian, dimana pembayaran utangnya diambil dari hasil penjualan barang-barang jaminan utang tersebut.

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 KUHPerdota, semua benda milik debitor bergerak atau tidak bergerak sudah ada ataupun akan ada menjadi tanggungan atas utang yang dibuatnya.

Jaminan kebendaan yang berlaku saat ini, antara lain :

1. *Hipotek* dasar hukumnya adalah KUHPerdota (Buku kedua)

Saat ini, yang berlaku hanya untuk hipotek kapal laut. Sementara hipotek untuk pesawat udara semula berlaku berdasarkan Undang-undang Penerbangan No. 15 Tahun 2009 yang tidak menyebutkan lagi tentang hipotek pesawat terbang. Jadi, hipotek kembali hanya dapat diikatkan kepada kapal laut saja.

2. *Hak tanggungan* berobjekkan hak atas tanah serta benda-benda yang berkaitan dengan dasar hukum UU hak tanggungan.
3. *Gadai* berobjekkan benda-benda bergerak, dengan dasar hukumnya KUHPerdota.
4. *Gadai Tanah* berobjekkan benda-benda bergerak, dengan dasar hukumnya adalah hukum adat dan dikuatkan oleh Undang-Undang Pokok Agraria
5. *Fidusia* berobjekkan benda bergerak (berwujud ataupun tidak berwujud) dan benda tidak bergerak khususnya yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan dengan dasar hukumnya adalah Undang-undang Fidusia.

*Jaminan perorangan* adalah jaminan yang hanya mempunyai hubungan langsung dengan pihak pemberi jaminan, bukan terhadap benda tertentu. Jaminan perorangan ini hanya dapat dipertahankan terhadap orang-orang tertentu. Nantinya, seorang kreditor lewat jaminan ini dapat saja mengambil harta debitor yang wanprestasi, dengan atau tanpa pranata hukum yang disebut “sita jaminan”. Bagaimanapun juga, yang terikat sebagai jaminan di sini bukanlah barangnya, melainkan

orangnya.

Jaminan perorangan (dalam artian yang luas) dapat diklasifikasikan lagi ke dalam tiga golongan, yaitu :

- Garansi pribadi (*personal guarantee*);
- Jaminan perusahaan (*corporate guarantee*);
- Garansi bank (*bank guarantee*).

Perbedaan di antara ketiga jenis jaminan perorangan tersebut adalah tentang siapa yang menjadi subjek pemberi garansi: terhadap garansi pribadi, yang menjadi subjek pemberi jaminannya adalah orang secara pribadi; terhadap garansi perusahaan, yang menjadi subjek tersebut adalah pihak perusahaan (yang berbentuk badan hukum); sementara jaminan dalam bank garansi diberikan oleh suatu bank, yang biasanya tidak dimaksudkan sebagai jaminan kredit tetapi hanya jaminan atas pembayaran sejumlah uang tertentu atau atas pelaksanaan suatu pekerjaan tertentu (*performance guarantee*)- dalam praktiknya, garansi bank kadang-kadang dikenal juga dalam bentuk *standby letter of credit*.<sup>12</sup> Apabila dalam suatu hubungan hukum antara pihak yang satu dengan pihak lainnya dan ada salah satu yang tidak memenuhi

---

<sup>12</sup>Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang* (Jakarta : Erlangga, 2013), h. 10-11.

syarat sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati maka dalam hubungan hukum terjadi wanprestasi atau ingkar janji. Untuk dapat dikatakan bahwa salah satu pihak telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji, harus ada kepastian bahwa yang bersangkutan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak memenuhi prestasi dan setelah mendapatkan peringatan sampai 2 (dua) atau 3 (tiga) kali yang bersangkutan tetap tidak mau memenuhi syarat yang telah mmenuhi kewajibannya, baik itu sebagian maupun seluruhnya sesuai dengan perjanjian yang telah mereka sepakati bersama sehingga dapat dijadikan alasan utama untuk mengajukan gugatan.

Dalam perikatan sebagaimana diatur dalam pasal 1234 BW dinyatakan : Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Kalimat yang menyatakan “untuk memberikan sesuatu” dalam suatu perikatan di sini merupakan kewajiban pihak yang berutang (debitur) yaitu untuk memenuhi syarat yang telah ditentukan sesuai dengan perjanjian yang telah mereka buat atas kesepakatan bersama. Sedangkan kalimat yang menyatakan bahwa “untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu” merupakan wewenang yang diberikan oleh undang-undang untuk para pihak yang berkepentingan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, jika pihak yang berkepentingan telah memenuhi syarat dan atau telah terjadi wanprestasi atau ingkar janji.

Dalam hal terjadinya wanprestasi atau ingkar janji umumnya penggugat mengajukan gugatan dengan tuntutan berupa :

1. pemenuhan prestasi atau ganti rugi
2. bunga

3. pembatalan perjanjian yang telah mereka buat

4. membayar biaya perkara

5. membayar biaya eksekusi.<sup>13</sup>

### C. Dasar Hukum Perjanjian Utang Piutang

Masalah utang piutang juga dijelaskan dalam firman Allah swt dalam QS. al- .D

baqarah/2 :282 yaitu

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى أَفْضِلُوا لَكُتُبَ بَيِّنَاتٍ  
كَاتِبًا أَوْ عَلَاً لِّيَأْتِيَ كَاتِبُ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ وَأَلَّيْمُ لِلَّهِ الَّذِي عَلَيْهِ  
الْحَقُّ وَلَيَقُ اللَّهُ بِبُيُوتِكُمْ مَذْمُومَةً شَيْءٌ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ  
ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ  
رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنَا رَجُلَيْنِ فَحُلٌّ أَوْ رِمْلَانِ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ أَنْ  
تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا ذَرَاهُ لَا يَأْتِي الشَّهَادَةُ بِمَا دُعُوا وَلَا  
مُؤْتَلَدَانِ تَكْتُبُونَهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الشَّهَادَةِ  
أَلَّا تَرْضَوْنَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ  
جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُونَهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ لَا يُضِلُّوكُمْ أَهْلًا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا  
فَلْيَسْهُوْكُمْ بِكُمْ وَأَنْتُمْ أَلَّا يَعْلَمَكُمْ اللَّهُ وَيَدَّ اللَّهُ شَيْءٌ عَالِمٌ ٢٨٢

Terjemahan : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa

<sup>13</sup>Sarwono, *Hukum Acara Perdata : Teori dan Praktik* (Cet. II; Jakarta : Sinar Grafika, 2011), h. 304-305

yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.<sup>14</sup> Ayat di atas menganjurkan bahwa kreditur dan Pengadilan Islam harus bersedia memberikan tambahan waktu membayar kepada debitur yang berda dalam kesempitan, bahwa status kepalitan hanya memberikan penundaan dan kekebalan dari penagihan, bukan

---

<sup>14</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 48.



pembebasan, dan (terutama karena ayat tersebut turun dalam konteks larangan riba) bahwa penundaan yang diberikan kreditur tidak diganti rugi.<sup>15</sup>

Pengertian utang piutang sama halnya dengan “perjanjian pinjam meminjam” yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mana dalam pasal 1754 dijumpai ketentuan yang berbunyi sebagai berikut ; “Pinjam Meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

#### **D. Tanggung Jawab Hukum terhadap Perjanjian**

Pembatalan perjanjian dapat diminta oleh salah satu pihak dalam perjanjian yang merasa dirugikan. Suatu perjanjian dapat dimintakan pembatalan apabila:

1. Perjanjian yang di buat melanggar syarat subyektif sahnyanya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 Ayat 1 dan 2 KUHPPer, yaitu perjanjian tersebut lahir karena adanya cacat kehendak (*wilsgebreke*) antara lain karena kekhilafan, paksaan atau penipuan, atau karena ketidakcakapan pihak dalam perjanjian (*ombekwaamheid*), sehingga berakibat perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*).
2. Perjanjian yang di buat melanggar syarat obyektif sahnyanya perjanjian sebagaimana yang di atur dalam Pasal 1320 ayat 3 dan 4, perjanjian di buat tidak memenuhi syarat objek tertentu atau mempunyai causa yang tidak di perbolehkan seperti bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan, sehingga berakibat

---

<sup>15</sup>Frank E Vogel dan Samuel L. Hayes, *Hukum Keuangan Islam* (Cet. I; Bandung : Nusamedia, 2007), h. 81.

perjanjian tersebut batal demi hukum (*nietig*). Sesuai dengan ketentuan Pasal 1265 KUHPer, syarat batal adalah syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perikatan dan membawa segala sesuatu pada keadaan semula seolah-olah tidak ada suatu perjanjian.

Hal-hal yang harus diperhatikan sebagai syarat pembatalan suatu perjanjian adalah adanya wanprestasi, dimana wanprestasi selalu dianggap sebagai syarat batal dalam suatu perjanjian sehingga pihak yang merasa dirugikan karena pihak lain wanprestasi dapat menuntut pembatalan perjanjian. Penuntutan pembatalan perjanjian harus dilakukan melalui pengadilan sehingga yang membatalkan perjanjian adalah melalui putusan hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 1266 KUHPer. Menurut Subekti, pembatalan perjanjian dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara aktif, yaitu langsung dengan menuntut pembatalan di muka hakim atau dengan cara pembelaan, yaitu menunggu sampai digugat di depan hakim.<sup>16</sup>

Untuk memenuhi perjanjian dan baru mengajukan alasan mengenai kekurangan perjanjian itu. Jangka waktu tuntutan pembatalan perjanjian adalah lima tahun. Selain itu, perjanjian yang dapat dibatalkan adalah harus bersifat timbal-balik yakni perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Syarat diatas merupakan syarat yang harus dipenuhi terhadap perjanjian yang dapat di batalkan sedangkan bagi perjanjian yang batal demi hukum maka perjanjian tersebut tidaklah sah dan perjanjian dianggap tidak pernah ada.

Akibat pembatalan perjanjian di atur dalam Pasal 1451 dan 1452 KUHPer. Akibat hukum pada pembatalan perjanjian adalah pengembalian pada posisi semula

---

<sup>16</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Cet. I, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001), h.13

sebagaimana halnya sebelum terjadi perjanjian. Akibat pembatalan perjanjian dapat dilihat dari dua aspek. Pertama, pembatalan terhadap perjanjian yang melanggar syarat subyektif sahnyanya perjanjian sehingga perjanjian dapat dibatalkan, dan kedua adalah pembatalan terhadap perjanjian yang melanggar syarat obyektif perjanjian yang batal demi hukum.

Akibat terhadap perjanjian yang dapat di batalkan adalah salah satu pihak dapat meminta pembatalan perjanjian. Perjanjian akan tetap mengikat para pihak apabila tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan. Hak untuk meminta pembatalan perjanjian, menuntut pemulihan bahkan hak untuk menuntut ganti rugi merupakan hak bagi para pihak yang merasa dirugikan, sedangkan pihak lainnya yang telah terlanjur menerima prestasi dari pihak lain wajib mengembalikannya.

Sedangkan, akibat hukum terhadap perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian dianggap batal atau bahkan perjanjian dianggap tidak ada dan tidak pernah terjadi dari awal. Konsekuensi lanjutan dari pembatalan perjanjian adalah apabila setelah pembatalan salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan apa yang telah diperolehnya maka pihak lain dapat mengajukan gugatan. Hal ini semata-mata untuk melaksanakan tujuan pembatalan yaitu mengembalikan keadaan sebagaimana semula sebelum perjanjian terjadi.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontra Komersil* (Jakarta :Kencana, 2010), h.294.

### **BAB III**

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam melakukan suatu penelitian hukum tidak dapat terlepas dengan penggunaan metode penelitian. Karena setiap penelitian apa saja pastilah menggunakan metode untuk menganalisis permasalahan yang diangkat. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Dalam melakukan penelitian agar terlaksana dengan maksimal maka penelitian menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

#### ***A. Jenis dan lokasi penelitian***

##### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (*field research*), penelitian kualitatif adalah sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terperinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami. Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang<sup>1</sup> untuk membuat pendaaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat populasi atau suatu daerah tertentu.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian : Skripsi, tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* (Jakarta : Kencana, 2011), h. 34.

<sup>2</sup>Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : Radjawali Pers, 2009), h. 73.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu di Sungguminasa, Kabupaten Gowa karena tempatnya yang strategis dekat dengan ibu kota provinsi. Di tempat ini juga banyak terjadi praktek perjanjian utang piutang. Karena dekat dengan ibu kota provinsi sehingga para pelaku mau membangun sebuah usaha sedangkan modalnya tidak ada dan membutuhkan kendaraan untuk mempermudah urusannya tetapi tidak punya modal untuk membeli barang tersebut. Sehingga mereka nekat untuk melakukan praktek utang piutang terutama dengan jaminan. Selain itu, kampus 2 UIN Alauddin berada di kabupaten Gowa, maka mahasiswanya harus mampu memberi ilmu yang bermanfaat khususnya di Kabupaten Gowa. Dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian ini diarahkan kepada pengungkapan pola pikir yang digunakan peneliti dalam menganalisis sarannya atau dalam ungkapan lain pendekatan ialah disiplin ilmu yang dijadikan acuan dalam menganalisis objek yang diteliti sesuai dengan logika ilmu itu. Pendekatan penelitian biasanya disesuaikan dengan profesi peneliti namun tidak menutup kemungkinan peneliti menggunakan multi disipliner.<sup>3</sup> Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut:

#### 1. Pendekatan Syar'i

---

<sup>3</sup>Muliati Amin, *Dakwah Jamaah (Disertasi)* (Makassar: PPS. UIN Alauddin, 2010), h. 129.

Pendekatan syar'i yaitu pendekatan dengan menggunakan ilmu syari'ah terkhusus fiqih islam yang terkait dengan masalah muamalah yang termasuk di dalamnya masalah perjanjian yang diingkari yang dapat dijadikan sebagai acuan didalam pembahasan.

## 2. Pendekatan Yuridis

Pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang kaitannya dengan undang-undang.

## 3. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis yaitu melakukan suatu analisa terhadap suatu keadaan masyarakat berdasarkan aturan Hukum Islam atau perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan perjanjian.

### **C. Sumber Data**

Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data yang digunakan akan dijelaskan sebagai berikut :

Sumber data primer yang peneliti gunakan adalah wawancara informan. Informan yang dimaksud yaitu pihak-pihak yang mengetahui atau menguasai permasalahan perjanjian utang piutang serta orang yang langsung melakukan praktek utang piutang yang akan dibahas serta dokumen-dokumen yang didapat langsung dari lokasi penelitian.

Adapun teknik yang digunakan untuk menentukan informan yaitu *Purposive Sampling Technique* yaitu cara penentuan sejumlah informan sebelum penelitian

dilaksanakan, dengan menyebutkan secara jelas siapa yang dijadikan informan. Alasan penulis menggunakan sampel tersebut karena ada beberapa informan memiliki ilmu tentang perjanjian utang piutang dan informan melakukan praktek perjanjian utang piutang secara langsung. Informan yang akan diwawancarai terdiri dari 3 orang dari Pegawai Pengadilan, 3 orang dari tokoh masyarakat, dan 5 orang dari pelaku utang piutang sehingga jumlah informan yang akan diwawancarai penulis sebanyak 11 orang informan.

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Nama Informan	Jumlah Informan	Keterangan
1.	Pegawai Pengadilan Negeri	3 orang	
3.	Tokoh Masyarakat	3orang	
3.	Pelaku utang piutang	5 orang	
Jumlah Informan		11 orang	

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) dan (*field research*) yaitu dengan menghimpun data-data dan peraturan perundang-undangan, buku-buku karya ilmiah, dan pendapat para ahli terkait dengan masalah yang akan dibahas.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari informasi yang diperoleh langsung dari informan. Pengumpulan data dan informasi yang dilakukan sebagai berikut:

## 1. Observasi

Observasi adalah alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Hal yang hendak diobservasi haruslah diperhatikan secara detail. Dengan metode observasi ini bukan hanya hal yang didengar saja yang dapat dijadikan informasi tetapi gerakan-gerakan dan raut wajah pun mempengaruhi observasi yang dilakukan.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan secara mendalam dan detail.<sup>4</sup> Dalam mengambil keterangan tersebut digunakan model snow-ball sampling yaitu menentukan jumlah dan sampel tidak semata-mata oleh peneliti. Peneliti bekerjasama dengan informan, menentukan sampel berikutnya yang dianggap penting. Teknik semacam ini menurut Frey ibarat bola salju yang menggelinding saja dalam menentukan subjek penelitian. Jumlah sampel tidak ada batas minimal atau maksimal yang penting telah memadai dan mencapai data jenuh yaitu tidak ditentukan informasi baru lagi tentang subjek penelitian.

---

<sup>4</sup>Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Cet, II; Bandung : Alfabeta, 2014), h. 155.



### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumen. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, cendramata, foto dan lain sebagainya. Sifat utama ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi ruang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Secara detail bahan dokumenter terbagi beberapa macam yaitu autobiografi, surat-surat pribadi, buku catatan harian, memorial, klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data diserver dan flashdisk, data tersimpan di website dan lain-lain.<sup>5</sup> Teknik ini digunakan untuk mengetahui sejumlah data tertulis yang ada di lapangan yang relevan dengan pembahasan penelitian.

#### **E. Instrumen Penelitian**

Instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri, yakni peneliti yang berperan sebagai perencana, pelaksana, menganalisis, menafsirkan data hingga pelaporan hasil penelitian. Peneliti sebagai instrumen harus mempunyai kemampuan dalam menganalisis data. Barometer keberhasilan suatu penelitian tidak terlepas dari instrumen yang digunakan, karena itu instrumen yang digunakan dalam penelitian lapangan ini meliputi: Daftar pertanyaan penelitian yang telah dipersiapkan, camera, alat perekam, pulpen dan buku catatan.

---

<sup>5</sup>Suwardi Endarsawara, *Penelitian Kebudayaan: Idiologi, Epistimologi dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), h. 116.

## ***F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data***

Data dalam penelitian kualitatif dianalisis melalui membaca mereview data (catatan observasi, transkrip wawancara) untuk mendeteksi tema-tema dan pola-pola yang muncul.<sup>6</sup> Metode kualitatif dilakukan dengan menganalisis data yang diperoleh dari wawancara masyarakat dan pegawai Pengadilan Negeri Sungguminasa tentang perjanjian utang piutang menurut Hukum Islam, peraturan perundang-undangan, buku kepustakaan, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah perjanjian utang piutang menurut Hukum Islam. Setelah hal tersebut tercapai, maka kemudian akan dihubungkan dengan data-data yang diperoleh penulis dari lapangan yang berupa hasil wawancara dengan informan yang bersangkutan, untuk itu kemudian dilakukan pengumpulan dan penyusunan data secara sistematis serta menguraikan dengan kalimat yang teratur dengan ditarik sebuah kesimpulan.



---

<sup>6</sup>Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010 ), h. 65.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian***

Kabupaten Gowa berada pada 12°38.16' Bujur Timur dari Jakarta dan 5°33.6' Bujur Timur dari Kutub Utara. Sedangkan letak wilayah administrasinya antara 12°33.19' hingga 13°15.17' Bujur Timur dan 5°5' hingga 5°34.7' Lintang Selatan dari Jakarta.

Kabupaten yang berada pada bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan ini berbatasan dengan 7 kabupaten/kota lain, yaitu di sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba, dan Bantaeng. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto sedangkan di bagian Barat berbatasan dengan Kota Makassar dan Takalar.

Luas wilayah Kabupaten Gowa adalah 1.883,33 km<sup>2</sup> atau sama dengan 3,01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten Gowa terbagi dalam 18 Kecamatan dengan jumlah Desa/Kelurahan definitif sebanyak 167 dan 726 Dusun/Lingkungan. Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar berupa dataran tinggi berbukit-bukit, yaitu sekitar 72,26% yang meliputi 9 kecamatan yakni Kecamatan Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Selebihnya 27,74% berupa dataran rendah dengan topografi tanah yang datar meliputi 9 Kecamatan yakni Kecamatan Somba Opu, Bontomarannu, Pattallassang, Pallangga, Barombong, Bajeng, Bajeng Barat, Bontonompo dan Bontonompo Selatan.

Daerah yang cukup leluasa untuk dikembangkan direkomendasikan sebagai kawasan budidaya umum utamanya pertanian tanaman pangan semusim dan pengembangan kawasan non pertanian seperti pemukiman, perkantoran dan perdagangan. Sedangkan sebagian besar daerah yang agak leluasa lainnya dan daerah yang kurang leluasa untuk dikembangkan merupakan daerah yang direkomendasikan sebagai kawasan budidaya terbatas umumnya pertanian (termasuk hutan).

Adapun daerah yang tidak layak kembang maka direkomendasikan sebagai kawasan lindung. Daerah yang cukup leluasa untuk dikembangkan sebagian besar terletak di dataran Sungguminasa - Takalar, sedangkan yang tidak layak menempati daerah di sekitar puncak perbukitan dan pegunungan terjal, sempadan sungai, waduk/danau dan mata air.

Dari total luas Kabupaten Gowa, 35,30% mempunyai kemiringan tanah di atas 40 derajat, yaitu pada wilayah Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya, Bontolempangan dan Tompobulu. Dengan bentuk topografi wilayah yang sebahagian besar berupa dataran tinggi, wilayah Kabupaten Gowa dilalui oleh 15 sungai besar dan kecil yang sangat potensial sebagai sumber tenaga listrik dan untuk pengairan. Salah satu diantaranya sungai terbesar di Sulawesi Selatan adalah sungai Jeneberang dengan luas 881 Km<sup>2</sup> dan panjang 90 Km.

Di atas aliran sungai Jeneberang oleh Pemerintah Kabupaten Gowa yang bekerja sama dengan Pemerintah Jepang, telah membangun proyek multifungsi DAM Bili-Bili dengan luas + 2.415 Km<sup>2</sup> yang dapat menyediakan air irigasi seluas + 24.600 Ha, konsumsi air bersih (PAM) untuk masyarakat Kabupaten Gowa dan

Makassar sebanyak 35.000.000 m<sup>3</sup> dan untuk pembangkit tenaga listrik tenaga air yang berkekuatan 16,30 Mega Watt.

Seperti halnya dengan daerah lain di Indonesia, di Kabupaten Gowa hanya dikenal dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Biasanya musim kemarau dimulai pada Bulan Juni hingga September, sedangkan musim hujan dimulai pada Bulan Desember hingga Maret. Keadaan seperti itu berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan, yaitu Bulan April-Mei dan Oktober-Nopember. Curah hujan di Kabupaten Gowa yaitu 237,75 mm dengan suhu 27,125°C. Curah hujan tertinggi yang dipantau oleh beberapa stasiun/pos pengamatan terjadi pada Bulan Desember yang mencapai rata-rata 676 mm, sedangkan curah hujan terendah pada Bulan Juli - September yang bisa dikatakan hampir tidak ada hujan. Tabel 1

Ibu Kota Kecamatan, Jarak dan Luas Kecamatan<sup>1</sup>

Tahun 2010

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jarak dari Ibukota Kab. (Km)	Luas Kecamatan (Km <sup>2</sup> )	% Thd Luas Kab.
1.	Bontonompo	Tamallayang	16	30,39	1,61
2.	Bontonompo Selatan	Pabundukang	30	29,24	1,55
3.	Bajeng	Kalebajeng	12	60,09	3,19
4.	Bajeng Barat	Borimatangkasa	15,80	19,04	1,01
5.	Pallangga	Mangalli	2,45	48,24	2,56

<sup>1</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Sungguminasa,\\_Somba\\_Opu,\\_Gowa](https://id.wikipedia.org/wiki/Sungguminasa,_Somba_Opu,_Gowa) diakses pada tanggal 29 Maret pukul 08.00 WITA

6.	Barombong	Kanjilo	6,5	20,67	1,10
7.	Somba Opu	Sungguminasa	0,00	28,09	1,49
8.	Bontomarannu	Borongloe	9	52,63	2,79
9.	Pattallassang	Pattallassang	13	84,96	4,51
10.	Parangloe	Lanna	27	221,26	11,75
11.	Manuju	Bilalang	20	91,90	4,88
12.	Tinggi Moncong	Malino	59	142,87	7,59
13.	Tombolo Pao	Tamaona	90	251,82	13,37
14.	Parigi	Majannang	70	132,76	7,05
15.	Bungaya	Sapaya	46	175,53	9,32
16.	Bontolempangan	Bontoloe	63	142,46	7,56
17.	Tompobulu	Malakaji	125	132,54	7,04
18.	Biringbulu	Lauwa	140	218,84	11,62
JUMLAH				1.883,33	100

### **B. *Praktek Perjanjian Utang Piutang di Sungguminasa Kabupaten Gowa***

Praktek perjanjian utang piutang menurut ibu Khusnul Khotimah salah satu Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang diwawancarai oleh penulis pada dasarnya setiap orang dapat membuat perjanjian, namun setiap yang mengikatkan diri pada suatu perjanjian tersebut haruslah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata 1320. Pasal ini berlaku untuk setiap jenis perjanjian yang ada, termasuk perjanjian tersebut adalah perjanjian utang piutang.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Khusnul Khotimah, Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, *Wawancara*, Gowa, 28 April 2017.

Dalam isi perjanjian, Lanjut Ibu Khusnul Khotimah harus memperhatikan pada prinsip-prinsip perjanjian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu prinsip tersebut harus dilihat dari asas kebebasan berkontrak, bahwa isi-isi suatu perjanjian dapat dibuat secara bebas, namun asas ini juga membatasi bahwa suatu perjanjian tidak boleh menyimpang dari apa yang telah diatur dalam undang-undang. Berdasarkan hal ini jelaslah bahwa asas menghendaki para pihak untuk membuat isi perjanjian yang tidak melawan hukum.<sup>3</sup>

Hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan, perjanjian-perjanjian itu dibagi dalam tiga macam, yaitu : perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang, perjanjian untuk berbuat sesuatu, dan perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu. Hal yang harus dilaksanakan tersebut dinamakan prestasi. Untuk mengetahui hal-hal apa yang harus dilaksanakan oleh pihak yang terikat dapat dilihat dari beberapa sumber.

1. Dari sumber undang-undang sendiri pada umumnya undang-undang hukum perjanjian telah mengatur beberapa ketentuan tentang kewajiban-kewajiban yang mesti dilaksanakan dengan sempurna.
2. Dari akta/surat perjanjian yang dibuat berdasarkan persetujuan dari kehendak para pihak.<sup>4</sup>

Kegiatan utang piutang yang dengan jaminan yang lazim disebut gadai merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan seseorang, baik primer maupun sekunder seperti juga yang dilakukan oleh masyarakat Sungguminasa

---

<sup>3</sup>Khusnul Khotimah, Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, *Wawancara*, Gowa, 28 April 2017.

<sup>4</sup>Khusnul Khotimah, Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, *Wawancara* dengan merujuk pada KUHPerdata tentang Perjanjian utang piutang hal. 378, Gowa 28 April 2017.

Kabupaten Gowa yang masyarakatnya melakukan praktek utang piutang dengan jaminan “barang kreditan” atau menggandaikan barang yang masih dalam angsuran.

Praktek tersebut banyak diketahui dikalangan masyarakat Sungguminasa dan ada sebagian yang ikut andil selain penggadaai dan pemegang gadai orang itu biasa disebut “makelar utang sewa”. Orang tersebut berperang sebagai pelancar jalannya utang piutang dengan jaminan “barang kreditan” tersebut. Sehingga menjadi lebih mudah dan tepat, bagi penggadaai cepat mendapatkan orang yang mau meminjaminya uang dengan jaminan barang dan uang tersebut dengan cepat diperoleh , tetapi sedikit sekali masyarakat yang menggunakan jasa makelar peduli ini kira-kira dari sepuluh orang yang mempraktekkan gadai seperti ini hanya 2 orang saja yang menggunakan jasa makelar tersebut.

Sedangkan bagi pemegang gadai bisa cepat mendapatkan barang yang digunakan sehingga barang tersebut bisa di manfaatkan, biasanya di sini antara penggadaai dan pemegang gadai saling membutuhkan uang secepatnya dan pemegang gadai mau memberikan pinjaman dengan jaminan karena dia juga membutuhkan barang untuk dimanfaatkan sebab dia tidak bisa membeli barang dengan harga kontan ini terpaksa dilakukan padahal risikonya sangatlah besar.

Barang di sini yang dijadikan jaminan utang biasanya berupa kendaraan bermotor yang dibeli oleh penggadaai di sebuah *dealer* dengan cara kredit yang pembayarannya sesuai dengan perjanjian. Dalam praktek utang piutang dengan jaminan “*barang kreditan*” ini, merupakan menggadaikan barang yang masih belum sepenuhnya dimiliki oleh penggadaai. Karena barang tersebut masih ada sangkutpautnya dengan pihak *dealer* yaitu berupa tanggungan untuk membayar angsuran.



Ada juga penggadai yang menyerahkan barangnya kepada pihak pemegang gadai sendiri tanpa bantuan makelar dari 10 orang hanya 2 orang yang menggunakan jasa makelar tersebut, karena dianggap lebih meringankan penggadai sebab kalau menggunakan jasa makelar penggadai memberikan imbalan 30 % dari uang yang diterima dari pemegang gadai sebagai imbalan jasa makelar tersebut.

Dari pengamatan penulis praktek perjanjian utang piutang ini kebanyakan dilakukan antar sesama teman, saudara atau juga antar tetangga. Mereka dalam pembelian barang (kendaraan bermotor) ini dilakukan dengan cara kredit dari pihak toko (*dealer*) akan tetapi karena ada sesuatu masalah yang mungkin untuk ketentuan rumah tangga atau butuh uang untuk melanjutkan angsuran kendaraan tersebut, maka mereka terpaksa menggadaikan barang yang dibeli dengan cara kredit.

Dalam praktek utang piutang dengan jaminan “barang kreditan” ini antara pihak penggadai dan pemegang gadai hanya berpegang kepada rasa saling percaya karena hal ini tidak dicatat atau tidak dibuatkan bukti tertulis antara kedua belah pihak. Oleh karena itu di antara keduanya harus bisa saling menjaga kepercayaan karena dalam hal ini apabila ada kecurangan pihak yang merasa dirugikan adalah pihak yang memberikan pinjaman utang atau pemegang gadai, akibat atau kerugian dari pihak pemegang gadai yaitu jika sewaktu-waktu pemilik barang gadai atau yang masih kredit itu tidak dapat membayar atau tidak dapat melunasi angsurannya maka kendaraan tersebut dapat diambil atau disita kembali oleh pihak *dealer*. Sedangkan jangka waktu utang piutang ini minimal selama 3 bulan jika terjadi masalah seperti ini pihak pemegang gadai harus rela melepaskan dan tidak bisa memanfaatkan barang tersebut serta sabar menunggu pihak penggadai melunasi utangnya sampai waktu jatuh tempo yang telah disepakati.

Pihak *dealer* juga merasa dirugikan kalau barangnya telah digadaikan padahal masih dalam masa angsuran, hal yang penting dari pihak penggadaai atau pihak yang mengangsur barang tetap membayar dan melunasi cicilan sesuai waktu yang telah ditentukan oleh pihak *dealer*. Adapun akibat yang paling fatal jika penggadaai tidak mau melunasi angsurannya maka pihak *dealer* juga sangat merasa dirugikan, mau menyita atau menarik kembali barangnya tidak tau dimana karena barang sudah berpindah tangan kadang kesulitan untuk melacakinya.

Dari kesimpulan transaksi tersebut antara pihak pemegang gadai dan pihak *dealer* (penjual) sama-sama dirugikan, bagi pihak *dealer* khawatir pemegang gadai khawatir jika sewaktu-waktu barangnya disita oleh *dealer* karena penggadaai tidak membayar angsurannya serta pemegang gadai khawatir uangnya akan lama kembali. Oleh karena itu dalam melakukan praktek utang piutang dengan jaminan “barang kreditan” seperti unsur hati-hati dan kesepakatan antara keduanya haruslah benar dan dijaga dengan sesungguhnya agar tidak ada masalah dan tidak ada yang merasa dirugikan.<sup>5</sup>

Menurut pendapat kepala RT di Sungguminasa Kabupaten Gowa memperhatikan kenyataannya tersebut bahwa praktek utang piutang dengan jaminan “barang kreditan” ini sebaiknya jangan dilakukan mengingat kemudharatan lebih banyak daripada manfaatnya, sering terjadi kesalahpahaman antar sesama teman, tetangga, juga saudara jadi tali silaturahmi kita antar sesama bisa berantakan dan terputus, meskipun antara dua pihak telah sepakat menanggung resiko tetapi hal itu tidak dapat menjamin sepenuhnya.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Marzuki, Pihak dealer, *Wawancara*, Gowa, 26 April 2017.

<sup>6</sup>Sabir dg Sitakka, kepala RT, *Wawancara*, Gowa, 26 April 2017.

### 1. Menaksir harga barang jaminan

Sebelum pemegang gadai memberikan uang kepada penggadai, maka biasanya pemegang gadai menaksir harga/barang jaminan tersebut. Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam menaksir barang jaminan adalah sebagai berikut :

- a) biasanya dilihat dari segi fisik barang, kalau keadaannya bagus maka bisa agak tinggi uang yang mau dikasih kepada penggadai dan bila barangnya jelek, harga lebih rendah.
- b) Karena barangnya masih kredit dan dalam masa angsuran biasanya harganya lebih rendah sebab belum memiliki surat atau Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).

Jadi yang dua itulah yang menjadi hal yang terpenting untuk menaksir barang atau menentukan besar kecilnya uang yang akan diberikan oleh pemegang gadai kepada penggadai, tetapi biasanya pemegang gadai hanya memberikan uang sesuai standar kerana pemegang gadai juga tidak mau rugi serta tidak mau menanggung resiko yang terlalu besar apabila terdapat masalah karena barang (kendaraan bermotor) tersebut belum mempunyai bukti-bukti surat berupa BPKB dari *dealer*, sehingga kalau terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki pemegang gadai tidak bisa membuktikan apa-apa atas barang tersebut.<sup>7</sup>

### 2. Adapun manfaat dan mudarat bagi pemegang gadai adalah

- a) Manfaat bagi penggadai

---

<sup>7</sup>Parlan, Makelar utang piutang dengan Jaminan “barang kreditan” , *Wawancara*, Gowa, 26 April 2017.

- 1) Mudah dalam memperoleh pinjaman dana atau uang dengan menggadaikan barangnya meskipun barang tersebut belum lunas pembayarannya.
  - 2) Dapat melunasi atau membayar cicilan kepada *dealer* dengan uang tersebut.
- b) Mudarat yang dirasakan penggadaai
- 1) Ketika penggadaai tidak bisa melunasi kepada pihak *dealer*, maka penggadaai tidak hanya berperkara dengan *dealer* tetapi juga dengan pihak pemegang gadai.
  - 2) Mendapatkan pinjaman uang dari pihak pemegang gadai kadang lebih sedikit sebab barang tersebut masih belum lunas pembayarannya jadi belum ada bukti kepemilikan kendaraan.<sup>8</sup>
- c) Manfaat bagi pemegang gadai
- 1) Untuk memenuhi barang sekunder karena keterbatasan membeli barang yang baru maka pemegang gadai memilih praktek utang sewa ini.
  - 2) Pengawasannya mudah dijangkau karena biasanya di sini utang piutang dilakukan dengan sesama saudara, teman atau tetangga.
- d) Mudarat yang dirasakan pemegang gadai
- 1) Jika sewaktu-waktu barang atau kendaraan tersebut ditarik kembali yang oleh yang berwenang karena disebabkan penggadaai tidak membayar angsuran kepada pihak *dealer*.

---

<sup>8</sup>Muklisin, Pihak Penggadaai, *Wawancara*, Gowa, 28 April 2017.

- 2) Tidak bisa berbuat banyak untuk mempertahankan barang tersebut karena tidak ada bukti tertulis.
- 3) Jika terjadi sengketa, maka pihak pemegang gadai tidak dapat menuntut terhadap barang tersebut itu bukan hak miliknya, melainkan kepada penggadai agar uangnya segera dikembalikan.<sup>9</sup>

Menurut Mochammad Djoenaidie Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa perjanjian praktek utang piutang dengan jaminan “barang kreditan” dalam melakukan kegiatan ini sebagian masyarakat Sungguminasa Kabupaten Gowa, maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan praktek utang piutang ini dengan jaminan “barang kreditan” ini dilakukan oleh orang yang berakal sehat dan bebas tidak ada paksaan dari orang lain. Dari data yang penulis peroleh bahwa kebanyakan yang melakukan praktek utang piutang dengan jaminan “barang kreditan” seperti ini dilakukan oleh sesama saudara, teman dan tetangga. Kemudian bahwasanya barang yang dijadikan obyek yang jaminan dalam praktek utang piutang ini barang yang dimanfaatkan di sini masyarakat biasanya menggunakan kendaraan bermotor, barang tersebut dijadikan jaminan atas utang padahal barang tersebut masih dalam keadaan kredit atau pembayarannya belum lunas.

Adapun syarat penting dalam praktek utang piutang dengan jaminan “barang kreditan” di Sungguminasa Kabupaten Gowa ini adalah :

Penggadai dan pemegang gadai, dalam melakukan praktek ini kebanyakan dilakukan oleh sesama saudara, teman dan tetangga yang saling mempercayai.

---

<sup>9</sup>Muhammad Ali, Pemegang Gadai, *Wawancara*, Gowa, 28 April 2017.

Syarat-syarat orang yang boleh melakukan praktek utang piutang dengan jaminan “barang kreditan” ini meliputi :

1. Dewasa dikatakan dewasa karena pihak penjual dan pembeli berusia 25 tahun ke atas.
2. Berakal sehat para pihak yang melakukan praktek utang piutang dengan jaminan “barang kreditan” ini tidak mengalami gangguan jiwa, praktek tersebut dilakukan secara sadar dan sehat.
3. Bebas dalam melakukan praktek utang piutang dengan jaminan “barang kreditan” tersebut, tidak ada unsur paksaan dari siapapun.

Kemudian Mochammad Djoenaidie selaku Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa menambahkan bahwa perjanjian praktek utang piutang dengan jaminan “barang kreditan” status barang yang dijadikan jaminan gadai yaitu dalam praktek utang piutang yang dijadikan jaminan “barang kreditan” ini terdapat permasalahan mengenai status barang yang digadaikan, karena barang yang digadaikan, karena barang tersebut (kendaraan bermotor) yang digadaikan masih ada sangkutpautnya dengan pihak *dealer*. Penggadaian masih ada kewajiban membayar biaya angsuran atau kreditan. Sebab barang tersebut belum lunas pembayarannya dan bisa dikatakan barang tersebut statusnya masih kepunyaan dua pihak sampai pembayarannya lunas barang itu baru bisa dimiliki sepenuhnya oleh penggadaian.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Mochammad Djoenaidie, Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa, *Wawancara*, Gowa, 26 April 2017.

Di dalam perjanjian dengan pihak *dealer* barang tersebut tidak oleh dipindah tangankan kepada pihak lain sebelum masa angsurannya itu lunas, tetapi masyarakat di sini tetap melakukan praktek seperti ini sehingga menyulitkan dan merugikan pihak *dealer* apabila penggadaai enggan membayar cicilan atau angsuran barang tersebut dan walaupun pihak *dealer* ingin menarik barang itu kembali maka akan kesulitan akan barang tersebut diigadaikan pindah tangankan atau di gadaikan kepada orang lain dan pihak *dealer* tidak mengetahui keberadaan barangnya.

Faktor- Faktor dan alasan terjadinya Praktek utang piutang dengan Jaminan “Barang Kreditan” di Sugguminasa Kabupaten Gowa.

1. Untuk kebutuhan hidup keluarga
2. Untuk pembayaran angsuran barang yang belum lunas
3. Untuk kebutuhan anak sekolah
4. Dan lain-lain

Adapun penyebab terjadinya praktek utang piutang dengan jaminan “barang kreditan” tersebut adalah dimana pihak penggadaai benar-benar membutuhkan dana untuk kebutuhan hidup keluarga dan untuk membayar biaya angsuran tempat di membeli barang tersebut. Karena tidak punya dana maka pihak yang mempunyai barang tersebut menjaminkan barangnya.

Praktek seperti ini diawali dengan perjanjian dengan pemegang gadai boleh memanfaatkan barang yang yang dijadikan jaminan tersebut untuk kebutuhan sehari-hari, jangka waktu gadai biasanya 3 bulan, apabila penggadaai belum sanggup melunasi dan menebus barangnya kembali biasanya waktu pelunasannya diulur-ulur. Hal ini menyebabkan kerugian terhadap pemegang gadai, risiko ditanggung penggadaai dan pemegang gadai apabila barang ditarik kembali oleh pihak *dealer* hal

ini disebabkan penggadaai tidak membayar angsuran, praktek seperti ini kadangkala tidak ada orang yang menyaksikan dan tidak dicatatkan, hanya saling percaya antar kedua dan sama-sama sepakat terutama yang dibuat, tetapi banyak di antara mereka terutama penggadaai setelah jatuh tempo pembayaran utang malah mengulur-ulur waktu yang telah disepakati.

Biaya perawatan barang ditanggung sepenuhnya oleh pemegang gadai, kemudian apabila pihak *dealer* menarik kembali atas barang tersebut pemegang gadai tidak bisa mempertahankan atas barang itu karena tidak mempunyai bukti untuk mempertahankannya. Oleh karena itu, diharuskan kedua belah pihak sama-sama toleransi agar tidak merugikan salah satu pihak.

Pihak penggadaai tetap membayar angsuran kepada pihak *dealer* meskipun barangnya digadaikan, sehingga pihak *dealer* tidak menarik kembali barang tersebut dan penggadaai juga harus tepat waktu dalam pengembalian utang serta menebus kembali barangnya kepada pihak pemegang gadai, begitupun pemegang gadai meski dibolehkan memanfaatkan barang tersebut pemegang gadai harus merawat dan menjaga barang jaminan itu tidak boleh seenaknya sendiri dalam pemanfaatannya.<sup>11</sup>

Kemudian bapak Abdul Latief selaku Panitera Muda Hukum di Pengadilan Negeri Sungguminasa memberi tips kepada para pembaca dalam meminjamkan barang kepada rekan atau seseorang kemudian merasa sulit untuk menagihnya. Cara yang dibenarkan menurut hukum adalah sebagai berikut:

---

<sup>11</sup>Mochammad Djoenaidie, Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa, *Wawancara*, Gowa, 28 April, 2016.



1. Anda dapat menegur secara baik-baik kepada orang yang meminjam barang anda baik lewat telepon, atau datang langsung kepada yang berhutang. Kemukakan maksud anda bahwa hutang tersebut jatuh tempo dan harus dikembalikan.
2. Ada kalanya anda dapat membuat semacam surat somasi atau teguran kepada yang berhutang yang isinya agar segera melunasi hutang tersebut. Kemukakan bahwa hutang tersebut dapat diselesaikan secara baik baik, tetapi jika tidak maka akan diselesaikan secara hukum.<sup>12</sup>

### ***C. Perspektif Masyarakat terhadap Perjanjian Utang Piutang di Kabupaten Gowa***

Menurut Suprianto salah satu mahasiswa di Uin Alauddin Makassar jika anda meminjamkan uang kepada si peminjam dan meminta bunga, pada dasarnya ketika bunga itu macet, maka si peminjam akan menjual barang yang menjadi jaminannya. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan, disarankan meminta barang jaminan dan membuat perjanjian. Jika terjadi kemacetan, maka si pemilik barang tadi harus menyerahkan kewenangannya kepada kita untuk menjual barang tersebut.<sup>13</sup>

Akan tetapi, misalnya ketika kita menjual barang tersebut untuk melunasi utang si peminjam yang berjumlah 5 juta rupiah, kemudian barang itu laku 7 juta rupiah, maka dalam hal ini yang boleh kita ambil sebagai pelunas utang si peminjam hanya 5 juta rupiah, sedangkan 2 juta rupiah (sisanya) kita pulangkan kepada si

---

<sup>12</sup>Abdul Latief, Wawancara Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, *Wawancara*, Gowa, 28 April, 2017.

<sup>13</sup>Suprianto, Mahasiswa Uin Alauddin Makassar, *Wawancara*, Gowa, 30 Maret 2017.

peminjam. Alasan bahwa uang pinjaman bisa dijadikan modal usaha merupakan alasan yang biasa dipakai rentenir. Patut disadari bahwa dalam Islam, utang-piutang sejatinya merupakan transaksi sosial. Orang yang mau meminjamkan uangnya kepada orang lain berarti telah melakukan kegiatan sosial, dan orang yang mau melakukan kegiatan sosial harus siap merugi, apapun yang terjadi. Utang-piutang dalam Islam tidak boleh dijadikan sarana untuk mencari keuntungan. Jika ingin mencari keuntungan, silakan lakukan kegiatan sewa-menyewa, jual beli jasa atau barang. Dengan demikian, ditegaskan lagi bahwa jika ingin mengamankan uang yang dipinjamkan, mintalah jaminan, buatlah perjanjian untuk kemudian mencairkan atau menjual barang jaminan pihak yang berutang dalam pinjaman tersebut.<sup>14</sup>

Sedangkan menurut Imam mesjid setiap utang yang membawa keuntungan, maka hukumnya riba. Hal ini terjadi jika salah satunya mensyaratkan atau menjanjikan penambahan. Dengan kata lain, bahwa pinjaman yang berbunga atau mendatangkan manfaat apapun adalah haram berdasarkan al Qur'an, dan as-Sunnah.

Keharaman itu meliputi segala macam bunga atau manfaat yang dijadikan syarat oleh orang yang memberikan pinjaman kepada si peminjam. Karena tujuan dari pemberi pinjaman adalah menolong si peminjam. Tujuannya bukan mencari kompensasi atau keuntungan.<sup>15</sup>

Menurut para pelaku utang piutang melakukan itu juga kondisi yang tidak mungkin lagi baginya mencari jalan selain berhutang sementara keadaan sangat mendesak. Sudah tidak ada jalan lain selain berutang.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>Suty, Wiraswasta, *Wawancara*, Gowa, 1 April 2017.

<sup>15</sup>Hamzah dg Nomp, Imam Mesjid Resky Paccinongan, *Wawancara*, Gowa, 1 April 2017.

<sup>16</sup>Hasbiyah, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Gowa, 31 Maret 2017.

Oleh karena itu, jika terjadi keterlambatan karena kesulitan keuangan, hendaklah orang yang berutang memberitahukan kepada orang yang memberikan pinjaman. Karena hal ini termasuk bagian dari menunaikan hak yang mengutangkan. Janganlah berdiam diri atau lari dari si pemberi pinjaman, karena akan memperparah keadaan, dan merubah utang, yang awalnya sebagai wujud kasih sayang, berubah menjadi permusuhan dan perpecahan.<sup>17</sup>

#### ***D. Pandangan Hukum Islam terhadap Perjanjian Utang Piutang di Kabupaten Gowa***

Manusia hidup tak selalu berada pada keadaan mudah, terkadang ada hal-hal yang membuat hidup manusia menjadi sulit. Terkadang penuh kelapangan, dan terkadang kekurangan dan membutuhkan bantuan. Karena itulah, dalam kehidupan sehari-hari, utang piutang sudah menjadi hal yang biasa. Syariat Islam melihat secara umum, bahwa aktivitas utang piutang atau pinjam meminjam, sejatinya adalah salah satu bentuk pelaksanaan ajaran tolong menolong antara manusia yang sangat dianjurkan dalam Islam.

Di dalam kehidupan sehari-hari ini, kebanyakan manusia tidak terlepas dari yang namanya utang piutang. Sebab di antara mereka ada yang membutuhkan dan ada pula yang dibutuhkan. Demikianlah keadaan manusia sebagaimana Allah tetapkan, ada yang dilapangkan rezekinya hingga berlimpah ruah dan ada pula yang dipersempit rezekinya, tidak dapat mencukupi kebutuhan pokoknya sehingga mendorongnya dengan terpaksa untuk berhutang atau mencari pinjaman dari orang-orang yang dipandang mampu dan bersedia memberinya pinjaman. Dalam ajaran

---

<sup>17</sup>Zul, Wiraswasta, *Wawancara*, Gowa, 31 Maret 2017.

Islam, utang-piutang adalah muamalah yang dibolehkan, tapi diharuskan untuk ekstra hati-hati dalam menerapkannya.

Memberi utang hukumnya sunnah, bahkan dapat wajib, misalnya mengutangi orang yang terlantar atau orang yang sangat membutuhkannya. Karena tiap-tiap orang dalam masyarakat biasanya memerlukan pertolongan orang lain.<sup>18</sup> Ini sesuai dengan firman Allah swt dalam QS al-Maidah/5: 2 berikut ini :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ تَتَّقُوا لَا تَتَّبِعُوا عَلَى الْإِثْمِ عُدْوَانًا ۚ

Terjemahan :

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.<sup>19</sup>

Mempiutangkan sesuatu kepada seseorang berarti telah menolongnya. Masalah utang piutang juga diatur dalam Firman Allah swt QS al Baqarah/2: 245 berikut ini:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ عَافَا كَثِيرَةً ۚ وَاللَّهُ بَصِيرٌ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN  
M A K A S S A R

وَيُضَاعِفُهُ ۖ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۚ ٢٤٥

Terjemahan:

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.<sup>20</sup>

<sup>18</sup>Sulaiman Rajid, *Fiqh Islam : Hukum Fiqh Lengkap*, (Cet xviii; Bandung : Sinar Baru Algensido. 2012), h. 306.

<sup>19</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 106.

<sup>20</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 39.

Pendapat Ulama juga menyebut akad peminjaman itu sebagai akad 'irfaq', yang berarti pemberian manfaat atau belas kasih. Oleh karenanya, memberikan pinjaman itu dianjurkan dalam Islam. Bahwasanya Rasulullah saw. bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتَيْهِمَا<sup>21</sup>

Terjemahan:

Tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman kepada muslim yang lain dua kali kecuali seperti shadaqah satu kali (HR Ibnu Majah)<sup>21</sup>

Jadi pemberian pinjaman itu merupakan perbuatan yang baik, membantu memberikan jalan keluar bagi seorang muslim yang mengalami kesempitan dan juga memenuhi kebutuhannya. Dalam ajaran Islam, utang-piutang adalah 'muamalah' yang dibolehkan, tapi diharuskan untuk ekstra hati-hati dalam menerapkannya. Karena utang bisa mengantarkan seseorang ke dalam surga, dan juga sebaliknya bisa menjerumuskan seseorang ke dalam neraka.

Syarat Utang Piutang dalam Islam

- Harta yang dihutangkan jelas dan dari harta yang halal.
- Pemberi pinjaman tidak dibolehkan mengungkit masalah hutang dan tidak menyakiti perasaan pihak yang piutang (yang meminjam).
- Pihak yang piutang (peminjam) niatnya adalah untuk mencukupi keperluannya dan mendapat ridho Allah dengan mempergunakan yang dihutangkan secara benar.

---

<sup>21</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam : Hukum Fiqh Lengkap*, h. 307.

- Harta yang diutangkan tidak membuat kita memberi kelebihan atau keuntungan pada pihak yang mempiutangkan.

Tidak jarang perjanjian-perjanjian yang dikemukakan melibatkan pihak yang awam dalam hal perjanjian utang piutang. Pelaksanaan perjanjian dengan segala konsekuensi hukumnya akan melibatkan pihak yang memiliki sistem hukum yang belum tentu sejalan dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Para pihak dalam perjanjian mungkin sepakat untuk menundukkan diri kepada hukum Indonesia.

Perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syariah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syariah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menempati atau melaksanakan perjanjian tersebut, dengan perkataan lain apabila isi perjanjian itu merupakan perbuatan yang melawan hukum (Hukum Syariah), maka perjanjian diadakan dengan sendirinya batal demi hukum.<sup>22</sup>

Suatu akad (perjanjian), apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya sesuai dengan ketentuan hukum, maka akad tersebut menjadi mengikat. Daya ikat akad tersebut menunjukkan arti bahwa akad bersangkutan tidak dapat diubah atau bahkan di putuskan oleh para pihak yang telah menyetujuinya secara sepihak berdasarkan kehendak sepihak.

Akan tetapi, bila kita ingat bahwa akad itu terbentuk berdasarkan kehendak dua pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul, maka masuk akal bahwa dengan ijab

---

<sup>22</sup>Chairuman Passribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* ( Cet. III; Jakarta : Sinar Grafika, 2004), h. 3

dan kabul serupa pemutusannya dapat pula dilakukan, dan inilah yang di sebut pemutusan akad berdasarkan kesepakatan para pihak, yang dalam hukum islam di kenal dengan istilah al-iqalah.<sup>23</sup>

Dalam pergaulan hidup sehari-hari jarang kita jumpai orang yang tidak berutang. Nampaknya utang ini sudah melekat pada kehidupan manusia di zaman modern ini. Memang demikianlah yang sering kita temui di masyarakat, orang begitu mudahnya berutang, tetapi tidak pernah memikirkan bagaimana pembayarannya. Akhirnya dia mengobral janji akan membayar besok, lusa, yang tidak pernah dia tepati. Padahal dalam Firman Allah swt QS. al Isra/17: 34

وَأَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ إِذَا عَاهَدْتُمْ ۚ وَبِذَلِكَ يَتَذَكَّرُ الْكَافِرُ ۚ ٣٤

Terjemahan :

Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.<sup>24</sup>

Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain, baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut.

Di lain pihak ada pula orang yang senang menunda pembayaran utangnya, walaupun sebenarnya ia mampu melunasi atau mencicil. Ia lebih mendahulukan keperluan lain daripada membayar utangnya. Dosa utang ini tidak akan hapus sebelum di bayar ataupun dibayarkan bahkan orang yang mati syahid pun dosa utangnya tidak akan terampung.

---

<sup>23</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Cet. Ke 2; Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2010), h. 342

<sup>24</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 285

Dalam al Qur'an kita tidak dilarang berutang , bahkan disuruh untuk membuat administrasi utang yang baik dengan menggunakan para saksi, memakai jaminan, dan ditulis secara baik oleh seseorang yang jujur.<sup>25</sup>

لَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا أَلْفُ مِائَةٍ أَوْ مِائَتَانِ بِضْعَ ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ ۚ كَذَلِكَ يُضَاعَفُ لِّلرِّبَا ۚ وَلَئِيْنَ يَدَّبَعَ ظُلُمَانُ مِنْ أَفْئِدَتِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۚ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.<sup>27</sup>

<sup>25</sup>Buchari Alma, *Kewirausahaan: Dilengkapi Lampiran Kegiatan Praktikum Membentuk Mental dan Keterampilan Wirausaha* (Cet. XIX; Alfabeta: Bandung, 2013), h. 262-265

<sup>27</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 4



adalah mengasihi si peminjam dan menolongnya. Dengan berutang maupun berpiutang kita dapat membuat pahala. Yang memberi pinjaman niatkan untuk ikut membantu meringankan beban sesama, ikut mengatasi kesulitan orang atau meningkatkan kesejahteraan orang lain., bukan menyengsarakan orang. Tentu saja dalam hal ini bagaimana niat dari yang memberi pinjaman, karena setiap amalan itu tergantung kepada niatnya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek Perjanjian utang piutang di Sungguminasa Kabupaten Gowa dengan jaminan “barang kreditan” kemudharatannya lebih banyak daripada manfaatnya, sering terjadi kesalahpahaman antar sesama teman, tetangga, juga saudara jadi tali silaturrahmim kita antar sesama bisa berantakan dan terputus, meskipun antara dua pihak telah sepakat menanggung resiko tetapi hal itu tidak dapat menjamin sepenuhnya
2. Perspektif masyarakat terhadap perjanjian utang piutang di Kabupaten Gowa yaitu mereka melakukan utang piutang karena adanya kebutuhan yang mendesak dan tidak ada jalan lain baginya selain berutang. Tetapi harus membuat administrasi utang yang baik dengan menggunakan para saksi, memakai jaminan, dan ditulis secara baik oleh seseorang yang jujur.
3. Pandangan Hukum Islam tentang perjanjian utang piutang yaitu memberi utang hukumnya sunnah, bahkan dapat wajib, misalnya mengutangi orang yang terlantar atau orang yang sangat membutuhkannya. Masalah utang piutang juga diatur dalam Firman Allah swt QS al Baqarah/2: 245 dan sabda Rasulullah yng diriwayatkan oleh Ibu Madjah.

### ***B. Implikasi Penelitian***

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, maka implikasi dari bab akhir skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jika ingin membuat suatu perjanjian utang piutang dengan jaminan “barang kreditan” harus memperhatikan terlebih dahulu kelebihan dan kekurangannya. Apabila kemudaratannya lebih banyak sebaiknya jangan dilakukan karena akan merugikan diri kita sendiri.
2. Bagi orang yang suka berutang, haruslah berhati-hati dan membuat rencana yang baik dan mencicil utangnya. Jangan sampai kita tidak mampu mencicil utang dan menunda pembayaran utang dengan janji-janji saja. Sebaiknya jika utang sudah banyak, jangan membuat kita menjadi malas, pengecut atau menjauhi dari orang yang punya piutang, menghindar bila akan berjumpa. Hadapilah semua dan berlindung kepada Allah dan makin rajinlah berusaha.
3. Bagi yang memberi utang niatkan untuk ikut membantu dan meringankan beban sesama, serta ikut mengatasi kesulitan orang atau meningkatkan kesejahteraan orang lain dengan meminjamkan barang atau uang. Bukan menyengsarakan orang dengan mengambil keuntungan dari perjanjian tersebut.

## KEPUSTAKAAN

### A. Buku

- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif, Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, Ed.1 . Cet. II; Rajawali Pers, 2015.
- Alma, Buchari. *Kewirausahaan: Dilengkapi Lampiran Kegiatan Praktikum Membentuk Mental dan Keterampilan Wirausaha*. Cet. XIX; Alfabeta: Bandung, 2013.
- Amin, Muliati. *Dakwah Jamaah (Disertasi)* . Makassar: PPS. UIN Alauddin, 2010.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Riba, Utang piutang, dan Gadai*. Bandung : Alma'arif. 1983.
- Damanuri, Aji. M.E.I., *Metedologi Penelitian Mu'amalah* Cet. I; Yogyakarta : STAIN Po PRESS, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa*. Ed.4; Jakarta : PT. Gramedia Utama, 2012.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010.
- Endarsawara, Suwardi. *Penelitian Kebudayaan:Idiologi, Epistimologi dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006.
- Fuady, Munir. *Hukum Jaminan Utang*. Jakarta : Erlangga, 2013.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamala*. Edisi I, Cet. II; Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1997.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung : J-ART, 2004.
- Marilang. *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari perjanjian*. Makassar: Alauddin Pers. 2013.
- Marwan, M dan Jimmy P. *Kamus Hukum*. Surabaya : Reality Publisher, 2009.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cet. IX; Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2012.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cet. IX; Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2012.
- Nasution, S. *Metode Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsinto, 1996.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian : Skripsi, tesis, Disertasi, dan Karya Imiah* . Jakarta : Kencana, 2011.
- Pasaribu, Chairuman dan Sahrawadi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Cet. III; Jakarta : Sinar Grafika, 2004.

- Patrick, Purwahid. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan dari Undang-Undang*. Mandar Maju: Bandung, 1994.
- Poerwadarminta, WJS. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. ke 9; Jakarta : Balai Pustaka, 1997.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam : Hukum Fiqh Lengkap*. Cet xviii; Bandung : Sinar Baru Algensido. 2012.
- Samudera, Teguh, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Cet. II; Bandung: Alumni, 2004.
- Sarwono. *Hukum Acara Perdata : Teori dan Praktik*. Cet. II; Jakarta : Sinar Grafika, 2011.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. I, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa, 2004.
- Subekti. *Hukum Pembuktian*. Cet. XXIII; Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.
- Suharnoko. *Hukum Perjanjian : Teori dan Analisa Kasus*. Cet. I; Jakarta : Prenada Media. 2004.
- Suratman, dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Cet, II; Bandung : Alfabeta, 2014.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Radjawali Pers. 2009.
- Ukasyah, Nur Muhammad . *Mengenal Suatu Hukum Pengantar*. Skripsi Sarjana. Makassar; Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. 2016.
- Vogel, Frank E dan Samuel L. Hayes. *Hukum Keuangan Islam*. Cet. I; Bandung : Nusamedia, 2007.

## **B. Wawancara**

- Armanto, Wawancara Wiraswasta, Gowa, 1 April 2017.
- Djoenaidie, Mochammad. Wawancara Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa, Gowa, 28 Desember, 2017.
- Hamzah dg Nampo, Wawancara Imam Mesjid Resky Paccinongan, Gowa, 1 April 2017
- Hasbiyah, Wawancara Ibu Rumah Tangga, Gowa, 31 Maret 2017.
- Khatimah, Khusnul, Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, Gowa, 28 April, 2016.
- Latief, Abdul, Wawancara Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, Gowa, 28 April, 2017.
- Suprianto, Wawancara Mahasiswa Uin Alauddin, Makassar, 30 Maret 2017.
- Sutyono, Wawancara Wiraswasta, Gowa, 1 April 2017.

Zul, Wawancara Wiraswasta, Gowa, 31 Maret 2017.

Marzuki, Pihak dealer, Wawancara, Gowa, 26 April 2017.

Sabir dg Sitakka, kepala RT, Wawancara, Gowa, 26 April 2017.

Parlan, Makelar utang piutang dengan Jaminan “barang kreditan” , Wawancara, Gowa, 26 April 2017.

Muklisin, Pihak Penggadai, Wawancara, Gowa, 28 April 2017.

Muhammad Ali, Pemegang Gadai, Wawancara, Gowa, 28 April 2017

### ***C. Internet***

[https://id.wikipedia.org/wiki/Sungguminasa,\\_Somba\\_Opu,\\_Gowa](https://id.wikipedia.org/wiki/Sungguminasa,_Somba_Opu,_Gowa) diakses pada tanggal 29 Maret pukul 08.00 WITA.





# LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
MAKASSAR

## **DAFTAR LAMPIRAN**

**Surat Izin Penelitian**

**Surat Keterangan Telah Meneliti**

**Pedoman Wawancara**

**Dokumentasi Hasil Penelitian**





## DOKUMENTASI PENELITIAN











## **PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN**

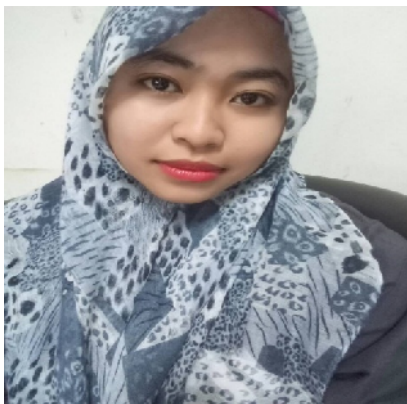
### ***A. Pegawai Pengadilan Negeri Sungguminasa***

1. Bagaimana aturan hukum dan undang-undang tentang perjanjian utang piutang?
2. Bagaimana status barang jaminan yang dijadikan barang gadai?
3. Apa kelebihan dan kekurangan praktek perjanjian utang piutang yang dijadikan dengan jaminan barang kreditan?
4. Apakah perjanjian utang piutang dengan jaminan barang kreditan sesuai dengan KUH Perdata?
5. Bagaimana cara yang baik menagih utang kepada orang lain?

### ***B. Tokoh Masyarakat dan Para Pelaku Utang Piutang***

1. Apa yang menyebabkan seseorang melakukan praktek perjanjian utang piutang dengan jaminan barang kreditan?
2. Seberapa banyak orang yang melakukan praktek perjanjian utang piutang dengan jaminan barang kreditan?
3. Apa kelebihan dan kekurangan pihak penggadai dan pemegang gadai?
4. Bagaimana status barang jaminan yang dijadikan barang gadai?
5. Bagaimana menurut anda perjanjian utang piutang dengan memakai bunga?
6. Bagaimana menurut anda perjanjian utang piutang dengan adanya jaminan?
7. Apa solusi agar terhindar dari riba?

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**EKA GUSTI KARDILLAH**, lahir di Selayar, pada tanggal 24 Mei 1995. Merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Buah hati dari bapak Gazali dan Ibu ST. Rahma. Mulai memasuki jenjang pendidikan formal tahun 2001 hingga tahun 2007 di SDN BENTENG 1, Kec. Benteng, kab. Kepulauan Selayar. Kemudian Penulis melanjutkan pendidikan

pada tahun 2007 hingga 2010 di SMP Negeri 1 Benteng Kab. Kepulauan Selayar. Pada saat duduk di kelas 3 SMP penulis menjabat sebagai bendahara Osis. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan pada tahun 2010 ke sekolah SMA Negeri 1 Benteng, Kab. Kepulauan Selayar dan tamat pada tahun 2013. Dan saat duduk dibangku SMA lagi-lagi penulis menjabat sebagai bendahara umum osis.

Setelah tamat SMA, penulis melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar melalui jalur UMK dan mengambil Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum pada tahun 2013. Penulis bersyukur atas karunia Allah swt sehingga dapat mengenyam pendidikan yang merupakan bekal untuk masa depan penulis. Di bangku kuliah penulis hanya pernah menjabat sebagai Bendahara Dusun pada posko 8 di Desa Pangaparang, Kec. Lembang, Kab. Pinrang pada tahun 2016. Penulis berharap dapat mengamalkan ilmu yang dapat diperoleh sebaik-baiknya dan membahagiakan orangtua serta berusaha menjadi manusia yang berguna bagi agama, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.